

# **SKRIPSI**

**ANALISIS PERIZINAN PERTAMBANGAN PADA KANTOR DINAS  
PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KARIMUN  
(Studi Implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang  
Pertambangan Mineral dan Batubara)**



Disusun Oleh

**NANANG NURDIN**

**NIM. 10875004424**

**PROGRAM S1  
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2012**

## **ABSTRAK**

### **Analisis Perizinan Pertambangan Pada Kantor Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Karimun (Studi Implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)**

---

oleh

**NANANG NURDIN**

10875004424

*Skripsi ini berjudul Analisis Perizinan Pertambangan Pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun (Studi Implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) . Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan didalam pemenuhan persyaratan-persyaratan perizinan pertambangan pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun, yang dinilai terlalu sulit dalam pemenuhannya karena terlalu banyak persyaratan-persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemohon atau perusahaan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan, sehingga perusahaan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut menjadi terhambat dan memakan waktu lama dalam pelaksanaannya hal ini terkait dengan adanya permasalahan lelang dan teknis.*

*Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana proses perizinan pertambangan pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun , untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses perizinan pertambangan pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, data skunder serta data primer sebagai pendukung yaitu melalui observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada key informan.*

*Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Analisis Perizinan Pertambangan Pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun (Studi Implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) belum berjalan secara optimal dan didapat jawaban “Kurang Baik”. Kemudian terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Perizinan Pertambangan Pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun.*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah. ....	17
1.3 Tujuan Penelitian. ....	17
1.4 Manfaat Penelitian. ....	17
1.5 Sistematika Penulisan. ....	18
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b>	
2.1 Kerangka Teori .....	20
A. Pengertian Perizinan .....	20
B. Unsur-unsur perizinan. ....	23
C.. Tujuan Perizinan .....	23
D. Pengertian Pertambangan. ....	24
E. Perizinan Pertambangan. ....	26
F. Persyaratan Izin Pertambangan. ....	27
G. Izin Usaha pertambangan dilihat dari Perspektif Islam. ....	38

2.2 Definisi Konsep.....	42
2.3 Konsep Oprasional. ....	44
2.4 Hipotesis.....	46

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

3.1 Waktu dan lokasi penelitian. ....	47
3.2 Jenis dan Sumber Data. ....	47
3.3 Populasi dan Sampel. ....	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data. ....	48
3.5 Analisis Data. ....	49

### **BAB IV GAMBARAN UMUM**

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Karimun. ....	51
4.2 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun diBidang Pertambangan. ....	53
4.3 Jenis Dan Jumlah Usaha Pertambangan diKabupaten Karimun. ....	55
4.4 Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Karimun. ....	58
4.5 Tingkat Pendidikan akhir Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Karimun.....	59
4.6 Uraian Tugas ( <i>Job Description</i> ) Bagian/Unit Dinas .....	60
4.7 Struktur Organisasi Pada Kantor Dinas Pertambangan Kab_Karimun.....	64

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Identitas Responden. ....	65
A. Tingkat pendidikan.....	65
B. Tingkat Umur. ....	66
C. Jenis Kelamin. ....	67

D. Masa Kerja. ....	68
5.2 Perizinan Pertambangan Pada Kantor Dinas Pertambangan Kab. Karimun.	68
A. Persyaratan lelang. ....	71
B. Persyaratan Administratif. ....	75
C. Persyaratan Teknis. ....	78
D. Persyaratan Lingkungan. ....	82
E. Persyaratan Finansial. ....	87

## **BAB VI PENUTUP**

6.1 Kesimpulan. ....	96
6.2 Saran. ....	97

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BIOGRAFI**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I.1</b>	: Daftar Sektor pertambangan diKabupaten Karimun.....	6
<b>Tabel I.2</b>	: Daftar Perusahaan Pertambangan dan wilayah Pertambangan di Kab. Karimun. ....	7
<b>Tabel I.3</b>	: Data Perusahaan yang mendapat Izin Pertambangan Pada Tahun 2009- 2011 Pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun. ....	9
<b>Tabel III.1</b>	: Daftar Populasi dan Sampel Perusahaan Pertambangan di Kabupaten Karimun. ....	50
<b>Tabel IV.1</b>	: Tingkat Pendidikan akhir pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Karimun. ....	61
<b>Tabel V.1</b>	: Jumlah reponden pada perusahaan pertambangan berdasarkan tingkat pendidikan. ....	67
<b>Tabel V.2</b>	: Jumlah responden pada perusahaan pertambangan berdasarkan tingkat umur. ....	68
<b>Tabel V.3</b>	: Jumlah responden pada perusahaan pertambangan berdasarkan jenis kelamin. ....	68
<b>Tabel V.4</b>	: Jumlah responden pada perusahaan pertambangan berdasarkan lama berkerja. ....	69
<b>Tabel V.5</b>	: Jawaban responden tentang persyaratan administratif dalam pemenuhan persyaratan lelang.....	73
<b>Tabel V.6</b>	: Jawaban responden tentang persyaratan teknis dalam pemenuhan persyaratan lelang. ....	73

<b>Tabel V.7</b>	: Jawaban responden tentang persyaratan finansial dalam pemenuhan persyaratan lelang. ....	74
<b>Tabel V.8</b>	: Rekap jawaban responden tentang kesanggupan dalam memenuhi persyaratan lelang untuk mendapatkan wilayah usaha izin pertambangan (WIUP).....	75
<b>Tabel V.9</b>	: Jawaban responden tentang pelaksanaan memenuhi persyaratan administratif dari masing-masing jenis perusahaan dalam rangka pemenuhan persyaratan administrative. ....	76
<b>Tabel V.10</b>	: Jawaban responden tentang pelaksanaan memenuhi persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi dalam rangka pemenuhan persyaratan administratif. ....	77
<b>Tabel V.11</b>	: Rekap jawaban responden tentang kesanggupan dalam memenuhi persyaratan administratif untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP). ....	78
<b>Tabel V.12</b>	: Jawaban responden tentang kesanggupann melengkapi persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi dalam rangka pemenuhan dari persyatratan teknis. ....	80
<b>Tabel V.13</b>	: Jawaban responden tentang kesanggupann melengkapi persyaratan Peta WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang dilengkapi oleh batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dalam rangka memenuhi dari persyaratan teknis. ....	81
<b>Tabel V.14</b>	: Rekap jawaban responden tentang kesanggupan dalam memenuhi persyaratan teknis untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP)..	82

<b>Tabel V.15</b> : Jawaban responden berdasarkan pernyataan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (untuk eksplorasi ) dalam rangka memenuhi dari persyaratan lingkungan.....	84
<b>Tabel V.16</b> : Jawaban responden berdasarkan pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ( untuk oprasi produksi ) dalam rangka memenuhi persyaratan lingkungan.....	85
<b>Tabel V.17</b> : Jawaban responden berdasarkan Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.( untuk operasi produksi ) dalam rangka memenuhi persyaratan lingkungan. ....	86
<b>Tabel V.18</b> : Rekap jawaban responden tentang kesanggupan dalam memenuhi persyaratan lingkungan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP). ....	87
<b>Tabel V.19</b> : Jawaban responden berdasarkan pemenuhan persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi didalam persyaratan finansial untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP). ....	89
<b>Tabel V.20</b> : Jawaban responden berdasarkan pemenuhan persyaratan Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public dalam rangka pemenuhan dari persyaratan finansial untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP). ....	90
<b>Tabel V.21</b> : Jawaban responden berdasarkan Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang dalam rangka memenuhi persyaratan finansial untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP). ....	91



<b>Tabel V.22</b> : Jawaban responden berdasarkan Pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah. dalam rangka memenuhi persyaratan finansial untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP). .....	92
<b>Tabel V.23</b> : Rekap jawaban responden tentang kesanggupan dalam memenuhi persyaratan finansial untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP). .....	93
<b>Tabel V.24</b> : Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Pelaksanaan Perizinan Pertambangan Pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun. ....	95

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia dianugrahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Pertambangan memunculkan peta ekonomi baru di daerah yang dulunya terpencil termasuk penyerapan tenaga kerja langsung dan tak langsung. Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diharapkan menjadi penggerak pembangunan, pengembangan sektor Pertambangan Mineral dan Batubara harus berdasarkan praktik pertambangan yang baik dan benar dengan memperhatikan elemen dasar praktik pembangunan berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan hidup.

Dalam proses pembangunan khususnya dalam bidang pertambangan selalu tidak terlepas dari pada masalah investasi, berbicara masalah investasi tampaknya jika dilihat fakta yang ada di Indonesia, Investasi baru semakin menurun karena kurang percaya para investor akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi serta ketidakpastian pemberlakuan Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Akan terdapat beberapa kecerahan disaat iklim investasi memburuk sebagaimana yang terjadi di Indonesia pada saat ini, hal itu akan ditandai dengan melonjaknya harga komoditi mineral dunia yang akan memacu kenaikan laba

perusahaan tambang terkemuka di dunia, sehingga kegairahan produksi dan eksplorasi muncul kembali dan membuat usaha ini masih dipandang layak dan ekonomis. (Sutedi, 2011:104) Hambatan utama dalam investasi tambang Indonesia adalah:

- 1) Rezim finansial yang tidak menarik, tidak lagi kompetitif.
- 2) Peraturan perundang- undangan yang tumpang tindih dan saling bertentangan.
- 3) Ketidakpastian seputar otonomi daerah, serta
- 4) Kurangnya perlindungan dan keamanan bagi aset yang dimiliki.

Untuk merealisasikan investasi ke Negara ini dalam konteks otonomi daerah perlu rasanya mengikutsertakan daerah dalam menangani hal ini, di Indonesia banyak sekali daerah-daerah yang mempunyai potensi dalam hal untuk mendapatkan pendapatan asli daerah di antaranya dalam bidang Pertambangan. Kabupaten Karimun merupakan sebuah Kabupaten yang terletak di daerah Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Negara tetangga yaitu Malaysia, kabupaten karimun mempunyai beberapa pendapatan daerah diantaranya yaitu dari hasil pertambangan diantaranya adalah pertambangan Timah, Bauksit, Batu granit, Pasir darat dan Pasir laut. Melihat potensi yang terdapat di Kabupaten Karimun tersebut hendaknya pemerintah daerah harus tanggap dalam melihat peluang ini dan memberikan keleluasaan kepada para investor, Koperasi, perorangan, dan perusahaan untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini, dengan memanfaatkan peluang ini perlu rasanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan swasta untuk membangun daerah dari hasil potensi yang

ada dan untuk merealisasikan otonomi daerah dan hal ini perlu adanya Undang-Undang yang mengatur dari proses berjalanya aktifitas tersebut agar tidak terjadi kecurangan, pemanfaatan, dan ketidakbertanggungjawaban pihak pengelola.

Sebenarnya otonomi daerah merupakan konteks yang melatarbelakangi lahirnya sejumlah perubahan dalam Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang disahkan pada tanggal 12 Januari 2009 dan sebelumnya pada tanggal 16 Desember 2008 telah disetujui bersama antara dewan perwakilan rakyat (DPR) dan Pemerintah.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan, pengelolaanya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut selama lebih dari empat dasawarsa

sejak di berlakukanya telah banyak member sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional.

Dalam perkembangannya lebih lanjut, Undang-undang tersebut yang materinya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan dimasa depan. Disamping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 telah memuat beberapa perbaikan yang cukup mendasar yang penting diantaranya adalah dihapusnya sistem kontrak karya (KK) bagi perusahaan pertambangan dan diganti dengan sistem izin usaha pertambangan (IUP) namun meski telah memuat beberapa perubahan Undang-undang Mineral dan Batubara dapat dikatakan masih sangat minim dalam hal yang berkaitan dengan kejelasan perencanaan, pengelolaan, kebijakan, dan strategi pertambangan nasional yang akan dituju.

Menurut penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sejalan dengan diundangkanya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu melakukan penataan kembali pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:

1. Pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, dan izin pertambangan rakyat.
2. Mengutamakan pemasok kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri guna menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
3. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
4. Peningkatan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
5. Penerbitan perizinan yang transparan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.
6. Peningkatan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara didalam negeri.

Setelah muncul Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-undang terdahulu yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, dari hal ini tampaknya Pemerintah Kabupaten Karimun khususnya pada Instansi Dinas Pertambangan dan Energi, yang bertanggungjawab dalam mengurus izin Pertambangan dan dari pada proses Pertambangan yang ada mengalami kesulitan dalam Pengimplementasian Undang-undang baru yaitu Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara yang akan mengganggu dan menghambat dari proses izin Pertambangan, dalam hal ini tentu perusahaanpun dalam melakukan proses izin tersebut harus menunggu lama, dengan banyaknya persyaratan demi persyaratan yang ada dan akan memerlukan waktu yang lama dan dinilai berbelit dari proses administrasinya. dan hal ini dapat dibuktikan dengan data yang penulis dapatkan dari tempat penelitian yaitu pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun.

**Tabel I.1: Daftar Sektor Pertambangan di Kabupaten Karimun.**

No	Sektor Pertambangan di Kabupaten Karimun		
	Sektor	Jumlah Perusahaan	Persentase (%) $\frac{n \times 100}{28}$
1.	Sektor Granit	8	28,57 %
2.	Sektor Timah	11	39,18 %
3.	Sektor Bauksit	3	10,71 %
4.	Sektor Pasir Darat	5	17,85 %
5.	Sektor Pasir Laut	1	03,57 %
<b>Total</b>		<b>28</b>	<b>100 %</b>

**Sumber : Data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun.**

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Kabupaten Karimun mempunyai berbagai potensi di bidang pertambangan dari sektor-sektor pertambangan yang tentunya merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT. Dari data yang penulis dapatkan pada Kantor Dinas Pertambangan Kabupaten Karimun terdapat 5 sektor pertambangan yaitu sektor Granit, Timah, Bauksit, Pasir Darat dan Pasir Laut dan dari masing-masing sektor yang ada digerakkan oleh beberapa perusahaan.

Sektor Granit terdapat 8 Perusahaan (28.57%) yang menjadi penggerak dari proses Pertambangan, Sektor Timah terdapat 11 Perusahaan (39.18%), Sektor Bauksit terdapat 3 Perusahaan (10.71%), Sektor Pasir darat terdapat 5 Perusahaan (17.85%) dan pada Sektor Pasir Laut terdapat 1 Perusahaan (03.57%), dan total keseluruhan dari Perusahaan yang beroperasi dibidang Pertambangan yaitu terdapat 28 Perusahaan (99.88%) dari 5 Sektor yang ada.

Tabel dibawah ini adalah Nama-nama perusahaan Pertambangan dan daerah tempat Pertambangan di Kabupaten Karimun berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun.

**Table I.2 : Daftar Perusahaan Pertambangan Dan Wilayah Pertambangan Di Kabupaten Karimun.**

No	Nama Perusahaan	Kecamatan
	<b><u>Batu Geranit</u></b>	
1.	PT. Wira Penta kencana	Tebing
2.	PT. Wira Penta KencanaEx. CV. Mandiri	Meral
3.	PT. Pacifik Granitama	Meral
4.	PT. Bukit Alam Persada	Meral
5.	PT. Bukit Granit Mining Mandiri	Tebing
6.	PT. Riau Alam Anugrah Indonesia	Meral
7.	PT. Kawasan Dinamika Harmonitama	Meral
8.	PT. Karimun Garanit	Meral
	<b><u>Timah</u></b>	
9.	PT. Tambang Timah DU. 618 B - DU 618 C	Kundur Barat Kundur Barat
10.	PT. Timah TbkDU 621 - DU 747	Kundur Barat Tebing
11.	PT. Eunindo Usaha Mandiri Blok A. C.D	Meral, karimun, tebing



12.	PT. penta IntiMandiri Blok III, IV, VI	Durai, Kundur
13.	PT. karimun Mining Blok A,B,C	Kundur, Karimun, Tebing
14.	PT. Aneka Alam Anugrah Blok I,II	Meral
15.	PT. Wahana Indah Karya Blok I s/d VII	Meral, Tebing, Karimun, Kundur, Durai
16.	PT. Teramahkota Megah Kreasi Blok I,IV	Karimun,Durai Kundur
17.	PT. Tin Kundurindo Blok I s/d IV	Kundur Barat, Meral
<b><u>Bauksit / Batu Besi</u></b>		
18.	PT. Bukit Merah Indah Blok I, III, IV, V, VI	Buru, Durai, Kundur
19.	PT. Aneka Alam Anugrah Blok I,II,III	Buru, Kundur Utara, Kundur
20.	PT. Inti Dabo Energi Blok I,II,III	Kundur Utara
<b><u>Pasir Darat</u></b>		
21.	PT. Perintis Moro Aditya	Moro
22.	PT. Bintang Pasir Primer	Moro
23.	PT. Sindo Mandiri	Moro
24.	PT. Malarko Khairil Amal	Moro
25.	Pertambangan Rakyat	Meral, Kundur
<b><u>Pasir Laut</u></b>		
26.	Pertambangan Rakyat	Meral Karimun Kundur

***Sumber : Data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun.***

Dari tabel 1.2 diatas dapat di jelaskan bahwasanya dari 5 (lima) sektor pertambangan yang ada yaitu Granit, Timah, Bauksit, Pasir darat, dan Pasir laut mempunyai beberapa perusahaan yang terdaftar pada Dinas Pertambangan dan Eergi Kabupaten Karimun, dari sektor Granit terdapat 8 perusahaan di masing-masing kecamatan diKabupaten Karimun, pada sektor Timah terdapat 11 perusahaan, pada sektor Bauksit terdapat 3 perusahaan, dan pada sektor Pasir darat terdapat 5 perusahaan kemudian pada sektor Pasir laut terdapat 1 perusahaan.

Untuk merealisasikan proses pertambangan dari beberapa perusahaan yang ada harus melalui proses izin pertambangan pada pihak terkait yaitu Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Karimun yang nantinya akan disetujui dan dikeluarkan surat perizinan oleh Bupati.

Data dibawah ini merupakan rekap data perusahaan yang melakukan izin Pertambangan pada Kantor Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Karimun dari tahun 2009-2011.

**Tabel I.3: Data Perusahaan Yang Mendapat Izin Pertambangan Pada Tahun 2009-2011 Pada Kantor Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Karimun.**

No	Nama Sektor dan jumlah perusahaan	Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011		Jumlah Perusahaan yang mendapat izin	Persentase (100%) $\frac{n \times 100}{21}$
		Perusahaan yang mengajukan izin	Perusahaan yang mendapat izin	Perusahaan yang mengajukan izin	Perusahaan yang mendapat izin	Perusahaan yang mengajukan izin	Perusahaan yang mendapat izin		
1.	Geranit 8 perusahaan	6	2	5	2	6	1	5	23,80%
2.	Timah 11 perusahaan	5	3	8	3	7	2	8	38,09%
3.	Bauksit 3 perusahaan	3	1	3	1	5	1	3	14,28%
4.	Pasir Darat 5 perusahaan	4	2	4	1	3	1	4	19,04%
5.	Pasir Laut 1 perusahaan	1	1	1	-	-	-	1	4,76%
<b>Jumlah</b>			<b>9</b>		<b>7</b>		<b>5</b>	<b>21</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Diolah oleh Penulis Berdasarkan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun.*

Tabel I.3 diatas membuktikan bahwasanya dalam penerapan Undang-undang Mineral dan Batubara (Minerba) ini belum tampak terlihat hasil yang maksimal dan dipandang kurang baik dari proses perizinannya dan tidak seperti yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari data perusahaan yang melakukan perizinan pertambangan pada tahun 2009-2011, dari data tersebut semakin lama semakin sedikit perusahaan yang melakukan perizinan pertambangan dan tentu saja jika melihat hal ini pasti terdapat masalah-masalah yang sedang terjadi sebagaimana yang telah penulis paparkan. oleh karena itu hal ini dapat menghambat dari kebijakan pemerintah diantaranya mengurangi pengangguran karena semakin lama proses izin ini berlangsung maka akan semakin lama juga peluang putra daerah untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan dapat menutup peluang putra daerah untuk masuk dan bekerja diperusahaan yang bersangkutan.

Data diatas terlihat bahwasanya dari 5 sektor pertambangan yang ada dari tahun ketahun semakin menurun jumlah perusahaan yang melakukan perizinan, dari 8 sekor geranit yang terdaftar, pada tahun 2009 terdapat 6 perusahaan yang melakukan izin kemudian hanya terdapat 2 perusahaan yang mendapat izin, pada tahun 2010 dari 5 perusahaan hanya 2 yang mendapatkan izin pertambangan, dan pada tahun 2011 dari 6 perusahaan hanya terdapat 1 perusahaan yang mendapatkan izin. Dari 11 sektor timah yang terdaftar, ditahun 2009 dari 5 yang melakukan izin hanya 3 yang mendapat izin, kemudian pada tahun 2010 dari 8 yang melakukan izin hanya 3 yang mendapat izin, kemudian tahun 2011 dari 7 perusahaan hanya 2 yang mendapat izin. Dari 3 sektor bauksit yang terdaftar, ditahun 2009 terlihat pada tabel terdapat 3

perusahaan yang melakukan izin namun hanya 1 yang berhasil mendapatkan izin, dan pada tahun 2010 masih sama dengan tahun 2010 berlanjut ketahun 2011 dari 5 yang mengajukan permohonan hanya 1 yang mendapatkan izin. Dari 5 sektor pasir darat yang terdaftar, pada tahun 2009 terdapat 4 perusahaan yang melakukan izin dan hanya 2 yang berhasil mendapatkan izin, pada tahun 2010 dari 4 perusahaan yang melakukan izin terdapat 1 yang mendapat izin dan terakhir pada tahun 2011 dari 3 yang melakukan izin hanya 1 yang berhasil mendapatkan izin. Kemudian dari 1 sektor pasir laut yang terdaftar, ditahun 2009 terdapat 1 perusahaan yang memohon izin dan dari 1 perusahaan tersebut mendapat izin, pada tahun 2010 sampai 2011 pada sektor pasir laut tidak ada perusahaan yang memohon izin. Kemudian dapat disimpulkan bahwasanya perusahaan yang memohon izin pertambangan dari tahun 2009-2011 terdapat 21 perusahaan. Diantaranya pada tahun 2009 terdapat 9 perusahaan yang mendapat izin dan pada tahun 2010 terdapat 7 perusahaan, kemudian pada tahun 2011 terdapat 5 perusahaan yang mendapat izin.

Berdasarkan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara bagian kedua pasal 42 ayat 1 dan 3. menyebutkan bahwasanya:

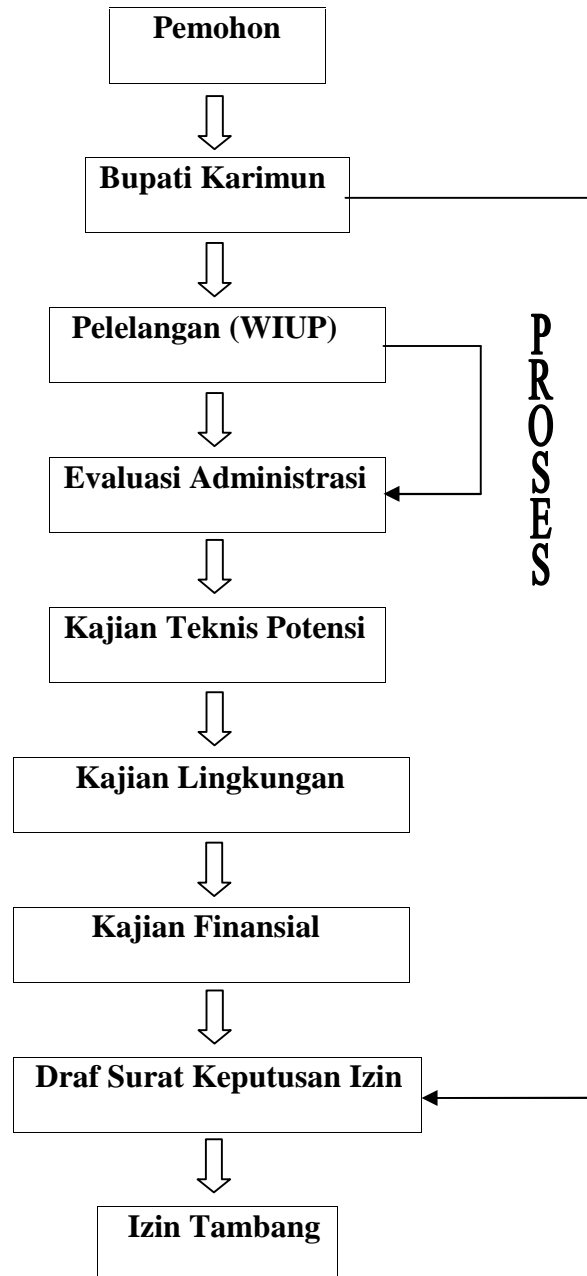
1. Izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
2. Izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Potensi pertambangan seperti, Bauksit, Timah, Pasir darat, Granit, dan Pasir laut dan sampai saat sekarang ini dari lima sektor pertambangan tersebut masih dalam pengawasan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Karimun. Namun dalam pengimplementasian Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 khususnya dalam hal perizinan terdapat masalah yaitu pegawai Dinas Pertambangan Dan Energi khususnya di Bidang Perizinan Pertambangan tampak tidak memberikan hal yang positif dalam prosesnya dan nantinya akan berdampak kepada hasil akhir yang akan dituju, kemudian dalam hal ini dinilai masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam proses administrasi khususnya pada proses perizinan pertambangan.

Proses izin pertambangan merupakan salah satu proses awal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan untuk membuka perusahaan baru pada sektor pertambangan dan proses izin ini berfungsi juga untuk melakukan proses perpanjangan masa kontrak perusahaan yang sudah berakhir masa izinnnya yang beroperasi di sektor pertambangan.

Pemberian izin ini diberikan oleh Bupati kemudian yang mengolah dari persyaratan-persyaratan tersebut adalah dinas Pertambangan dan Energi yang bertanggung jawab atas segala proses pertambangan yang berada di daerah, dan dalam penerapannya menggunakan beberapa ketentuan, persyaratan-persyaratan, Peraturan daerah, Peraturan Pemerintah dan undang-undangan yang harus diperhatikan dan dilengkapi.

**Gambar 1.2 : Bagan Alur Pengurusan Izin Usaha Pertambangan**



**Sumber : Profil Dinas Pertambangan dan Energi**

Dari bagan alur pengurusan izin pertambangan diatas dapat dijelaskan bahwasanya, Bupati/pemerintah mengumumkan wilayah izin usaha pertambangan

(WIUP) dalam jangka 3 bulan sebelum pelaksanaan pelelangan, setelah didapatkan pemenang lelang maka perusahaan untuk selanjutnya harus memenuhi persyaratan evaluasi administratif, kajian teknis potensi, kajian lingkungan dan kajian finansial kemudian setelah persyaratan itu terpenuhi Bupati mengeluarkan surat draf keputusan izin pertambangan kepada perusahaan, kemudian proses pertambangan baru bisa di jalankan/dilaksanakan.

Berikut adalah tabel yang menunjukan waktu ideal dalam masa perizinan pertambangan dan realitas yang terjadi di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun :

**Tabel 1.4 : Waktu ideal masa perizinan pertambangan dan realitasnya.**

No	Waktu Ideal masa perizinan pertambangan	Realitasnya
1.	Pasal 30 ayat (1) : Pemenang lelang wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dalam jangka 5 hari kerja harus menyampaikan permohonan izin usaha pertambangan (IUP) kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan.	Realitas dilapangan mengatakan dalam menyampaikan surat permohonan, pemohon memakan waktu hingga 9 sampai 15 hari kerja.
2.	Dalam jangka waktu 14 hari kerja persyaratan izin usaha pertambangan (IUP) harus telah dilengkapi oleh pemohon.	Biasanya perusahaan dalam melengkapi persyaratan memakan waktu hingga 28 hingga 40 hari kerja.

**Sumber : Data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun.**

Dari tabel 1.4 diatas menyatakan bahwasanya dalam hal pelaksanaan pemenuhan persyaratan izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan memakan waktu lebih dari yang ditetapkan sehingga dapat diketahui bahwasanya persyaratan

perizinan ini tidak semudah persyaratan sebelumnya yaitu dengan menggunakan Undang-undang nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan.

Sehingga Proses izin inilah yang menjadi masalah pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun khususnya dalam bidang Perizinan. dalam pelaksanaan proses pertambangan ini terdapat kendala-kendala dari persyaratan-persyaratannya yang begitu panjang, berbelit-belit dan memakan waktu lama dalam pelaksanaanya sehingga pihak pemohon atau perusahaan mengalami kesulitan dalam melaksanakan ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang ada, dan tentu saja hal ini juga berdampak kepada pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun, dimana pegawai harus menunggu lama untuk mengoreksi kelengkapan persyaratan-persyaratan perizinan pertambangan dari pihak pemohon atau perusahaan, sehingga dalam situasi ini terdapat kekosongan kerja pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun, persyaratan-persyaratan tersebut adalah merupakan persyaratan-persyaratan dari Undang-undang baru yang menggantikan Undang-undang lama yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-undang lama yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, Dimana dari ketentuan yang terdapat pada Undang-undang No.4 Tahun 2009 ini dinilai terlalu banyak persyaratan demi persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin Pertambangan.

Hal ini juga dipertegas dengan adanya poin permasalahan yang terjadi pada persyaratan yang terdapat di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun



yang dapat penulis jabarkan dalam dua bagian yaitu dalam proses Lelang dan Teknis yaitu :

#### 1. Lelang

Pelaksanaan Izin Pertambangan berdasarkan Undang-undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No 23 Tahun 2010 Pasal 8 ayat 3 menyatakan untuk mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) harus melewati proses lelang sedangkan pada Peraturan Daerah tidak mengatur tentang permasalahan lelang karena belum ada petunjuk/pedoman teknis dari kementrian sampai saat ini terhitung sejak tahun 2009. Sementara proses izin usaha pertambangan (IUP) ini dapat dilanjutkan apabila telah mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), proses lelang untuk mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) inilah yang menjadi salah satu persyaratan baru didalam pelaksanaan mendapatkan izin usaha pertambangan yang dinilai mempunyai banyak ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam pemenuhanya dan tentunya menambah dari persyaratan-persyaratan yang ada serta dinilai memperlambat proses perizinan pertambangan di daerah Kabupaten Karimun Khususnya Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun.

#### 2. Teknis

Berdasarkan Undang-undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 52 huruf a yang menjadi persyaratan perizinan pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun mengatakan luas lahan pertambangan Mineral dan Logam harus mencapai 5000 Hektar, tetapi

pada kenyataannya di daerah Kabupaten Karimun sangat susah mencari daerah Pertambangan khususnya Mineral dan Logam yang mencapai luas 5000 Hektar, Sedangkan potensi Mineral dan Logam yang terdapat di Kabupaten Karimun paling besar sekitar 300 Hektar. Dan tentunya dengan adanya persoalan dari ketentuan persyaratan ini sangat menghambat pemohon atau perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pertambangan.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan serta dari data yang penulis temukan dilapangan maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisisnya melalui penelitian dengan judul.

**“ANALISIS PERIZINAN PERTAMBANGAN PADA KANTOR DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KARIMUN” (Studi Implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan penulisan latar belakang masalah diatas, maka didapatlah suatu perumusan masalah yaitu sebagai berikut : “Bagaimanakah Proses Perizinan Pertambangan pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Proses Izin Pertambangan pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses Izin Pertambangan pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan bagi penulis untuk dapat mengetahui bagaimana Proses Izin Pertambangan pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun.
2. Memberikan sumbangsih pemikiran untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat dalam rangka peningkatan kerja pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun.
3. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi tolak ukur dalam penelitian lebih lanjut bagi peneliti lain untuk mengkaji aspek yang lain.

#### **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan skripsi ini, penulis susun ke dalam enam bab dan masing-masing bab terdiri beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai berikut:

##### **Bab I : Pendahuluan.**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

**Bab II : Telaah Pustaka**

Bab ini menguraikan tentang konsep, definisi konsep, konsep operasional/*variable* penelitian, hipotesis.

**Bab III: Metodologi Penelitian.**

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel teknik pengumpulan data, serta analisis data.

**Bab IV: Gambaran Umum Objek Penelitian.**

Bab ini merupakan bab yang berisikan sejarah singkat Kabupaten Karimun, keberadaan Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun, struktur organisasi dan uraian tugas sub-sub bagian.

**Bab V : Pembahasan Hasil Penelitian.**

Bab ini menguraikan tentang Proses Izin Pertambangan, kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perizinan pertambangan, solusi pemecahannya dan identitas responden.

**Bab VI : Penutup.**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan berpikir untuk melaksanakan penelitian dan teori yang dipergunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, dan konstruksi, definisi dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. (Singarimbun,2001:47).

##### **A. Pengertian Perizinan**

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan izin untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau usaha (Berge,2002:2).

Masalah perizinan merupakan masalah yang sifatnya cukup prinsipal, dilihat dari perkara tidak boleh ditariknya keputusan, tidak boleh dicampur baurkan dengan hal bahwa suatu keputusan tidak lagi penting, artinya setelah beberapa waktu karena maksudnya sebagai izin untuk melakukan suatu perbuatan tertentu saja, karena

seseorang yang dalam melakukan suatu tindakan berupa kegiatan haruslah mempunyai izin dan pada dasarnya dapat diubah dan ditarik kembali.

Tinjauan dari perizinan itu sendiri adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap salah. Didalam Hukum, istilah izin disebut juga dengan *Vergunning*, dan tidaklah mudah untuk memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan Izin. Menurut beberapa pakar yang di maksud dengan izin adalah :

#### 1) Menurut Utrecht

Izin adalah bilamana perbuatan tidak pada umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara masing-masing hal secara kongrint maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersidat suatu izin ( Utrecht,2001:152).

#### 2) Menurut Prins

Izin (*vegunning* ) adalah keputusan administrasi negara berupa peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal yang kongkrit (Prins,2000:53)

#### 3) N.M.Spelt dan J.B.J.M ten Berger

Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hubungan Administrasi Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk

mengemudikan tingkah laku warga masyarakat. Izin adalah satu persetujuan dari penguasa berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan.

Izin merupakan instrument yang banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah mengeluarkan izin untuk mengatur segala tindakan-tindakan yang terdapat didalam masyarakat, agar tidak bertentangan dengan ketentuan serta Perundang-undangan yang berlaku.

Menurut E. Utrecht yang dikutip Y. W. Sunindhia dan Ninik Widiawati, pengertian izin atau *vergunning* yaitu bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal kongkrit, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin. (Sunindhia,2003:105-106).

Izin dapat dibagi menjadi dua bagian :

1. Izin dalam arti yang luas yaitu suatu tindakan dilakukan demi kepentingan umum, maksudnya yaitu pemerintah membolehkan pemohon untuk melakukan tindakan- tindakan yang sebenarnya dilarang.
2. Izin dalam arti yang sempit yaitu bahwa suatu perbuatan mengenai izin pada dasarnya merupakan keinginan dari pembuat undang-undang. Tujuannya untuk mengatur segala tindakan yang dianggap merupakan tindakan yang tercela.

Pokok pada izin (dalam arti sempit ) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi setiap khusus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus,tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan agar dilakukan dengan cara tertentu ( dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan ).

### **B. Unsur-unsur Perizinan**

Izin adalah perbuatan atau tindakan pemerintah yang bersegi atau untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu/khusus.Dari persyaratan tersebut dapat diperoleh unsur-unsur perizinan yaitu (Ridwan,2003:15) :

- 1) Instrument yuridis
- 2) Peraturan perundang-undangan
- 3) Organ pemerintah
- 4) Peristiwa konkret
- 5) Prosedur dan persyaratan

### **C. Tujuan Perizinan**

Bagi pemerintah perizinan mempunyai tujuan untuk melaksanakan peraturan dan sedapat mungkin menjadikan sebagai peraturan yang sesuai dengan kenyataan



dilapangan. Dan terhadap masyarakat perizinan merupakan bentuk dari suatu kepastian hukum yang jelas terhadap suatu yang sebelumnya dilarang dan akhirnya diperkenankan.

Sedangkan mengenai tujuan perizinan tersebut dapat ditinjau melalui 2 sisi yaitu (Alfathia, 2001:15).

1. Dilihat dari sisi pemerintahan sebagai pemberi izin, perizinan tersebut mempunyai tujuan untuk dapat melaksanakan peraturan, apakah ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan kenyataan dilapangan. Dan perizinan yang diberikan oleh pemerintah secara tidak langsung memberikan pendapatan asli daerah itu sendiri.
2. Jika dilihat dari sisi pemohon yang dalam hal ini yaitu masyarakat, pada umumnya pemberian izin yang diberikan bertujuan untuk mengetahui adanya kepastian hukum mengenai perizinan tersebut. Dan untuk dapat terhindar dari hal-hal yang nantinya akan menimbulkan masalah dikemudian hari dan terakhir perizinan merupakan fasilitas oleh masyarakat.

Adapun fungsi dari perizinan adalah sebagai suatu instrument yuridis dari Pemerintah, izin yang dianggap ujung tombak instrumen hukum berfungsi sebagai (Ridwan,2003:150).

- a. Pengarah
- b. Perekayasa
- c. Perancang masyarakat adil dan makmur.
- d. Pengendali

- e. Penertib masyarakat ( jika berkaitan dengan fungsi hukum modern).

#### **D. Pengertian Pertambangan**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara pada Bab I pasal 1 ayat 3 dan 4.

Ayat (1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Ayat (3) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan pada bab I Ketentuan Umum Pasal I. dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padu.
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
4. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
5. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.
6. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

#### **E. Perizinan Pertambangan**

Secara jelas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Bab I ketentuan umum, pasal I bagian ke 4 Menyebutkan bahwasanya. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 ini juga menyebutkan bahwasanya terdapat beberapa Perizinan Pertambangan yaitu diantaranya:

1. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
2. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
3. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
4. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
5. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
6. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

PP No. 23 Tahun 2010 Tentang Kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara Menjelaskan bawasanya. Pengusahaan Pertambangan diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat. Penerbitan Perizinan yang harus transparan dalam usaha pertambangan mineral agar iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.

PP No. 22 tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan menjelaskan pada pasal I bahwasanya, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.

#### **F. Persyaratan izin Pertambangan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Pasal 6 Tentang Pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwasanya pada Bagian Kesatu Umum.

(1) IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.

(3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

(4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.

(5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Kemudian pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 IUP diberikan melalui tahapan:

- a. pemberian WIUP; dan
- b. pemberian IUP.

Mengenai hal diatas maka yang dimaksud dengan pemberian WIUP dan IUP dijelaskan pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 yaitu :

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
  - a. WIUP radioaktif;
  - b. WIUP mineral logam;
  - c. WIUP batubara;
  - d. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
  - e. WIUP batuan.
- (2) WIUP radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
  - a. diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara lelang.
- (4) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Secara umum persyaratan Izin Pertambangan dalam pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara terdapat beberapa ketentuan yaitu pada:

Bagian kesatu, pasal 36

(1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap:

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada pasal 37 diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada:

- a. Badan usaha;
- b. Koperasi; dan
- c. Perseorangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pertambangan Daerah menegaskan bahwasanya untuk mendapatkan izin usaha pertambangan harus terlebih dahulu mendapatkan atau mengusahakan wilayah izin usaha pertambangan, pada Bab V Wilayah Pertambangan bagian kesatu umum pasal 6 wilayah pertambangan sebagai dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan dan wilayah pertambangan tersebut ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang tercantum dalam persyaratan teknis pada pasal 52 mengatakan, pemegang izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi mineral logam diberi wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dengan luas paling sedikit 5000 hektar dan paling banyak 100.000 hektar.

Persyaratan untuk mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 dilakukan dengan cara lelang, menurut PP No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara pada pasal 13 menyatakan untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

1. Administratif

- a. Mengisi formulir yang sudah disiapkan oleh panitia lelang
- b. Profil badan usaha



- c. Akte pendirian yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- d. Nomor pokok wajib pajak.

## 2. Teknis

- a. Letak geografis, sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
- b. Pengalaman badan usaha, koprasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral dan batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan yang baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak dibidang pertambangan.
- c. Mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- d. Rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.
- e. Kaidah konservasi.
- f. Daya dukung lingkungan lingkungan
- g. Optimalisasi sumber daya mineral dan/ atau batubara
- h. Memperhatikan tingkat kepadatan penduduk.

## 3. Finansial

- a. Laporan tahunan terakhir yang sudah di audit akuntan publik
- b. Penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang telah berakhir.

- c. Pernyataan bersedia membayar nilai lelang wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Persyaratan Izin Usaha Pertambangan harus meliputi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, menurut PP No. 23 Tahun 2010 Pasal 23 menyebutkan bahwasanya persyaratan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi meliputi persyaratan sebagai berikut:

#### 1. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif terbagi menjadi 4 yaitu :

##### A. Persyaratan administratif untuk Badan usaha.

Persyaratan administratif untuk Badan usaha dalam hal ini terbagi menjadi 2 yaitu :

- a. Persyaratan administratif untuk badan usaha yang dimaksud adalah IUP Eksplorasi dan IUP Produksi Mineral netral Logam dan Batubara yaitu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Mengajukan Surat permohonan.
- b) Susunan direksi dan daftar pemegang saham ,dan
- c) Surat keterangan domisili.

- b. Sedangkan untuk IUP Eksplorasi dan IUP Produksi Mineral netral bukan Logam dan Batuan yaitu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Surat permohonan

- b) Profil badan usaha
- c) Akta pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- d) Nomor pokok wajib pajak.
- e) Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
- f) Surat keterangan domisili.

#### B. Persyaratan Administratif untuk Koperasi

Persyaratan administratif untuk Koperasi dalam hal ini terbagi menjadi 2 yaitu :

- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral logam dan Batubara meliputi.
  - a) Surat permohonan
  - b) Susunan pengurusan
  - c) Surat keterangan domisili.
- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral bukan Logam dan batuan.
  - a) Surat permohonan
  - b) Profil koprasi
  - c) Akta pendirian koprasi yang bergerak dibidang usaha Pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  - d) Nomor pokok wajib pajak
  - e) Susunan pengurus

f) Surat keterangan domisili

C. Persyaratan administratif untuk Perseorangan.

Persyaratan administratif untuk Perseorangan dalam hal ini terbagi menjadi 2 yaitu :

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral logam dan Batubara meliputi:

- a) Surat permohonan
- b) Surat keterangan domisili

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral bukan Logam dan batuan meliputi :

- a) Surat permohonan
- b) Kartu tanda penduduk
- c) Nomor pokok wajib pajak
- d) Surat keterangan domisili

D. Persyaratan administratif untuk Perusahaan Firma dan Perusahaan Komanditer.

Persyaratan administratif untuk Perusahaan Firma dan Perusahaan Komanditer dalam hal ini terbagi menjadi 2 yaitu :

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral logam dan Batubara meliputi:

- a) Surat permohonan.
- b) Surat pengurusan dan daftar pemegang saham.
- c) Surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral bukan Logam dan batuan meliputi :

- a) Surat permohonan
- b) Profil perusahaan
- c) Akta pendiri perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan
- d) Nomor pokok wajib pajak
- e) Susunan pengurus dan daftar pemegang saham
- f) Surat keterangan Domisili

## 2. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis yang dimaksud terbagi menjadi 2 yaitu :

a. IUP Eksplorasi, meliputi:

- a) Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- b) Peta WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang dilengkapi oleh batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

b. IUP Operasi produksi, meliputi:

- a) Peta wilayah yang dilengkapi oleh batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b) Laporan lengkap eksplorasi.
- c) Laporan studi kelayakan

- d) Rencana reklamasi dan pascatambang
- e) Rencana kerja dan anggaran biaya
- f) Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi.
- g) Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

### **3. Persyaratan Lingkungan**

Adapun persyaratan lingkungan yang dimaksud terbagi menjadi 2 yaitu :

- a. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Untuk IUP Operasi Produksi adalah pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **4. Persyaratan Finansial.**

Adapun persyaratan finansial yang dimaksud terbagi menjadi 2 yaitu :

- a. Untuk IUP Eksplorasi, meliputi :
  - a) Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi.
  - b) Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau

bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

b. Untuk IUP Operasi Produksi :

- a) Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public.
- b) Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.
- c) Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Dari pemaparan penulis diatas tentang persyaratan perizinan yang menggunakan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara maka dari itu penulis juga menampilkan persyaratan perizinan pertambangan dengan menggunakan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan.

1. Kuasa pertambangan penyelidikan umum atau kuasa pertambangan eksplorasi (pemohon baru).

- a. Surat permohonan
- b. Peta wilayah
- c. Akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.
- d. Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan
- e. Laporan keuangan bagi perusahaan baru dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi perusahaan lama.

## 2. Perpanjangan kuasa pertambangan penyelidikan umum

- a. Surat permohonan
- b. Peta wilayah
- c. Laporan kegiatan penyelidikan umum
- d. Rencana kerja dan biaya
- e. Tanda bukti pelunasan iuran tetap.

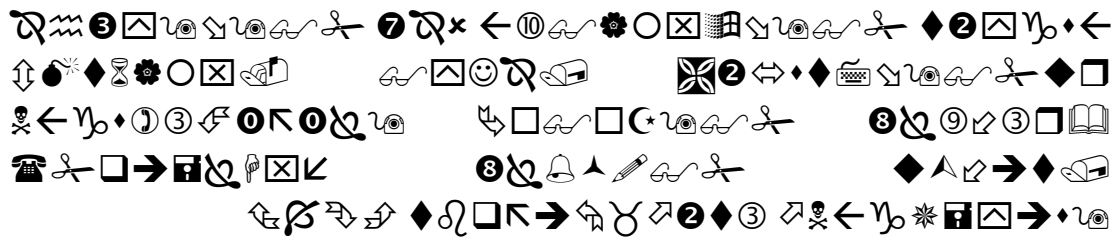
Berdasarkan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara bagian kedua pasal 42 ayat 1 dan 3. menyebutkan bahwasanya:

1. Izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
2. Izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

## **G. Usaha Pertambangan dilihat dari Persepektif Islam**

Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan tentunya tidak hanya melihat dari keuntungan semata saja tetapi dalam hal ini harus dilihat juga dari dampak lingkungan atau Amdal yang nantinya dapat berdampak negatif bagi lingkungan dan makhluk hidup lain disekitarnya, oleh karena itu dalam pemberian izin usaha pertambangan ini salah satu persyaratannya yaitu tentang persyaratan lingkungan, dalam persepektif islam, hal ini juga disinggung Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-Aruum ayat 41 :





Artinya : *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Kontekstualisasi Q.S Ar- Ruum ayat 41 terhadap masalah izin usaha pertambangan dapat dijelaskan bahwasanya manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, yang wajib menjaga kelestarian lingkungan di bumi ini dan bukan untuk merusaknya, artinya dalam proses pertambangan tidak boleh sembarangan dalam memperlakukan lingkungan dan harus didukung dengan peraturan ataupun persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan dalam prosesnya. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, Manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya.

Di dalam Al Qur'an dan Al Hadits Rasulullah diajarkan sikap yang dapat menjadi pegangan dan tuntunan hidup bagi perilaku manusia dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun perilaku terhadap sesama manusia yang berakibat tertentu terhadap alam. Al Qur'an dan Al Hadits sudah lebih dari cukup sebagai tuntunan kita sebagai khalifah di muka bumi.

## 1. Hormat terhadap Alam (*Respect For Nature*)

Manusia harus dapat menjadi rahmat untuk alam semesta bukan malah merusaknya. Di dalam Al Qur'an surat Al-Anbiya 107, Allah SWT berfirman:

وَمَا كُنَّا مُنْذِرِيكَ أَنَّكَ  
تَضِلُّنَا بِأَعْيُنِنَا  
وَمَا كُنَّا مُنْذِرِيكَ أَنَّكَ  
تَضِلُّنَا بِأَعْيُنِنَا

Artinya : *Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

## 2. Tanggung Jawab (*Moral Responsibility For Nature*)

Manusia wajib memiliki rasa tanggung jawab moral karena di utus oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi yang disertai amanah oleh Allah untuk menjaga kelestariannya. Di dalam Al Qur'an surah al Baqarah : 30, Allah SWT berfirman :

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا  
لِلْآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا  
إِسْرَافِيلَ قَالَ إِنَّمَا  
أُصِيبْتُ بِمَا كُنْتُ فِيهِ  
مُجْرِمًا

Artinya : *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.*

### 3. Kasih Sayang dan Kepedulian terhadap Alam (*Caring For Nature*)

Sebagaimana dimuat dalam sebuah Hadis shahih yang diriwayatkan oleh *Shakhihain*:

عن ابي رصي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يغرس غرسا, او يزرع ندعا. فياء كل منه طير او النسان او بهيمة. الا كان له به صدقة.  
( )

*Dari Anas radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Tidak seorang pun muslim yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam, kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternak, kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah untuknya.*

Dalam hadis lain dijelaskan

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : اتقوا اللان عنين. قالوا : وما اللان عنان؟ قال : الذي يتخلى فى طريق الناس او فى ظلمهم. (رواه مسلم)

*Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Jauhilah dua perbuatan yang mendatangkan laknat!” Sahabat-sahabat bertanya, “Apakah dua perbuatan yang mendatangkan laknat itu?” Nabi menjawab, “Orang yang buang air besar di jalan umum atau di tempat berteduh manusia”.*

#### 2.2 Defenisi Konsep

Defenisi konsep dimaksudkan untuk menghindari interpretasi ganda dari variabel yang diteliti. Defenisi operasional merupakan operasional adalah suatu

penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari variabel-variabel tersebut.

1. Proses lelang

Proses lelang ini merupakan syarat utama untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) selanjutnya setelah mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan ini baru masuk kepada persyaratan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dengan kata lain Izin Usaha Pertambangan diperoleh setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

2. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi ini adalah persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan yang didalamnya terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha pertambangan.

3. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis ini merupakan suatu persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan yang mempunyai tujuan untuk menentukan batas dan tata ruang tempat melakukan proses penambangan sesuai dengan Undang-undang.

4. Persyaratan Lingkungan

Persyaratan lingkungan termasuk juga sebagai persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan dimana persyaratan ini bertujuan

untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dengan mewajibkan pengusaha pertambangan untuk menata lingkungan dan mereklamasi lahan bekas tambang.

#### 5. Persyaratan Finansial

Persyaratan finansial dilakukan juga untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan yang mempunyai maksud untuk lebih transparan mengenai pembayaran dalam usaha untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan melalui bukti-bukti pembayaran yang ada.

6. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
8. Keterkaitan antara Perizinan Pertambangan dengan Undang-undang yang mengatur yaitu Undang-undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah terlihat bahwasanya terlalu banyak ketentuan dan persyaratan yang harus dijalankan dari Undang-Undang tersebut sehingga berdampak kepada pengurusan Izin Pertambangan di Kabupaten karimun.

## 2.3 Konsep Operasional

Menurut (Efendi,2001:42), konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu.

Konsep operasional merupakan suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari variabel-variabel tersebut. Adapun konsep-konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2010 Pasal 13 dan 23 mengenai izin usaha Pertambangan (IUP) dimana harus melaksanakan :

1. Persyaratan Lelang
  - a. Memenuhi persyaratan Administratif
  - b. Memenuhi persyaratan Teknis
  - c. Memenuhi persyaratan Finansial
2. Persyaratan Administratif
  - a. Memenuhi persyaratan administratif dari masing-masing jenis perusahaan.
  - b. Memenuhi persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi.
3. Persyaratan Teknis

- a. Melengkapi persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi
- b. Peta WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang dilengkapi oleh batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

#### 4. Lingkungan

- a. IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. IUP Operasi Produksi adalah pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Persyaratan Finansial.

- a. Memenuhi persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi
- b. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- c. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang.
- d. pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang kebenarannya harus dibuktikan melalui data yang terkumpul (Sugiono,2005:183). Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka penulis merumuskan hipotesis yaitu :  
”Diduga proses izin pertambangan pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun belum berjalan dengan baik, Karena terlalu sulitnya persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan.



### **BAB III**

#### **METODELOGI PENELITIAN**

##### **3.1 Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Penulisan ini adalah hasil dari penelitian yang di lakukan dalam waktu 2 (dua) bulan yaitu dari tanggal 01 - 29 februari 2012 dan di lanjutkan kembali dari tanggal 06 - 24 april 2012. lokasi tempat penulis melakukan penelitian adalah pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan sejumlah perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Karimun.

##### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis-jenis data menurut Suryabrata (2010; 39) :

1. Data Primer

Data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.

2. Data sekunder.

Data Sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari para pegawai yang ada secara langsung, dalam bentuk laporan, catatan, dan dokumen melalui kantor tempat penelitian, serta melalui studi melalui kepustakaan, peraturan Pemerintah, Perundang-undangan, dan buku-buku yang relevan lainnya.

### 3.3 Populasi dan Sampel

#### A. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, yaitu meneliti semua elemen dalam wilayah penelitian (Arikunto, 2002:108). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan populasi, 28 (Dua puluh delapan) perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Karimun.

#### B. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. (Sugiono, 2005:91).

**Tabel III.I : Daftar Populasi Dan Sampel Perusahaan Pertambangan di Kabupaten Karimun.**

No	Sub Populasi	Populasi	Sample	Persentasi
1.	Pengusaha Pertambangan di Kabupaten Karimun.	28	28	100 %
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun.*

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data tersebut dilakukan dengan cara :

#### A. Pengamatan langsung atau observation

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Oleh karena itu penulis langsung mengamati fenomena yang terjadi pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, tentang proses perizinan pertambangan. kemudian penulis melakukan pencatatan terhadap hal-hal tersebut yang di anggap penting untuk di jadikan data dalam penelitian ini.

#### B. Wawancara atau interview

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan Tanya jawab kepada responden seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun proses wawancara ini penulis lakukan kepada :

1. Kepala bidang perizinan pertambangan.
2. Kepala bidang penyuluhan dan pengawasan pertambangan.
3. Ketua Koordinasi (Kasi) Pengawasan air bawah tanah.

#### C. Kuesioner / Angket

Kuisisioner adalah pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden baik secara langsung ataupun tidak

langsung. Dan biasanya melalui perantara. Pengumpulan data ini penulis lakukan pada seluruh perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Karimun.

### **3.5 Analisis Data**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Menurut (Sugiono,2003:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat kemudian diambil kesimpulan dan saran.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai presentase, disajikan dalam bentuk Tabel dan uraian dengan rumus persentasenya menggunakan rumus, sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Persentase      N = Populasi

F = Ferkuensi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan proses perizinan pertambangan pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun, keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat Suhairimi **Ari Kunto (2003:171)**, sebagai berikut:

Tinggi/Baik : 68-100 %

Cukup sesuai/kurang Baik : 34-67 %

Tidak sesuai/Tidak Baik : 1-33 %

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Karimun**

Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Undang-undang No 53 Tahun 1999 . pada awal terbentuknya wilayah Kabupaten Karimun terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yakni Kecamatan Karimun, Kecamatan Moro dan Kecamatan Kundur. Selanjutnya berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Karimun No 16 Tahun 2001, maka wilayah Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi 8 (delapan) kecamatan. Dan akhirnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No 10 Tahun 2004 dimekarkan lagi menjadi 9 (Sembilan) kecamatan dan jumlah keseluruhan sebanyak 22 kelurahan dan 32 desa, 327 RW (rukun warga) dan 945 RT (rukun tetangga).

Wilayah Kabupaten Karimun memiliki luas mencapai 7.984 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari daratan seluas 1.524 Km<sup>2</sup> dan perairan 6.460 Km<sup>2</sup> dari jumlah luas tersebut, Kabupaten karimun memiliki pulau-pulau dengan jumlah 249 pulau yang telah berpenghuni sebanyak 54 pulau dan sisanya merupakan pulau-pulau yang belum berpenghuni.

Secara umum seluruh wilayah daratan di Kabupaten Karimun merupakan dataran landai sampau berbukit dengan ketinggian 0 – 478 m dpl. Namun ada juga wilayah berbukit dengan kemiringan sampai 400. Diwilayah pulau Karimun juga terdapat dua gunung yang menjadi simbol stratigrafi yaitu gunung jantan dan gunung

betina dengan ketinggian 478 m dpl, daerah ini merupakan salah satu sumber mata air pulau karimun besar ( *catchment area*).

Disamping itu , pada beberapa pulau di Kabupaten Karimun terdapat rawa-rawa. kemudian, dilihat dari keberadaan potensi wilayah maka wilayah laut (perairan) kabupaten merupakan perairan yang subur karena sebagian wilayah berada pada selat malaka.

Kabupaten ini berbatasan langsung dengan :

Utara : Selat Malaka dan Singapura

Selatan : Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.

Barat : Kecamatan Rangsang, Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

Timur : Kota Batam dan Kepulauan Riau.

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Karimun memiliki 245 pulau dimana 3 (tiga) diantaranya merupakan pulau-pulau yang besar, yakni : Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau Sugi. Laporan TPING menyebutkan bahwa dari hasil Inventarisasi 245 pulau di wilayah Kabupaten Karimun terdiri dari 73 pulau berpenghuni, 172 pulau tidak berpenghuni, 200 pulau bernama, 45 pulau tidak bernama.

Penduduk Kabupaten Karimun pada tahun 2008 adalah sebanyak 223.878 jiwa terdiri dari 89.221 jiwa laki-laki dan 134. 667 jiwa perempuan. Dan kepadatan penduduk 78 jiwa/km.

Kabupaten Karimun merupakan salah satu daerah otonom di wilayah provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan karakteristik dan struktur geologi, daerah Kabupaten

Karimun adalah daerah yang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang cukup potensial, terutama sumber bahan galian batuan dan sirtu. Posisi yang cukup bagi Kabupaten Karimun adalah berada pada kawasan yang berhadapan dan bertetangga langsung dengan Negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura serta berada pada posisi strategis dari jalur perdagangan dan pelayaran internasional (selat malaka).

Dengan kondisi yang geostrategi tersebut tentunya akan banyak potensi dibidang pemasaran, khususnya pemasaran bahan galian tambang hasil dari wilayah Kabupaten Karimun yang akan memacu pembangunan perekonomian. Disamping itu Kabupaten Karimun juga berpeluang untuk maju dan berkembang disektor lain seperti industri, pariwisata, maritim dan sektor-sektor lain.

Pulau Karimun dewasa ini cukup menjadi perhatian oleh berbagai pihak. Pulau ini selain menjadi tumpuan harapan para pencari kerja juga mendapat perhatian dari para pengusaha maupun pelancong yang datang ke daerah ini. Pulau ini tampak megah dan indah dengan pegunungan maupun perbukitan yang memiliki kandungan hasil bumi yang melimpah ruah.

## **1.2 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun diBidang Pertambangan**

Pemerintah Kabupaten Karimun mempunyai kebijakan tersendiri dibidang pertambangan diantaranya yaitu :

### **1. Sasaran**

- a. Tercapainya pertumbuhan sektor pertambangan, terutama pertambangan bahan galian golongan (c) .



- b. Terciptanya lapangan kerja berkualitas khususnya diwilayah zona masyarakat disekitar lokasi pertambangan yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran.
  - c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi penambangan yang tercermin dari peningkatan pendapatan dan peningkatan kelayakan hidup.
  - d. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat lokal disekitar lokasi penambangan dan rumah tangga masyarakat disekitar lokasi penambangan.
  - e. Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.
  - f. Menggali sumber daya alam secara optimal yang berwawasan lingkungan.
  - g. Mengoptimalkan lahan tidur sumber daya alam yang belum tergali secara optimal.
2. Arah kebijakan.
- a. Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah dari kegiatan usaha pertambangan.
  - b. Penyempurnaan sarana dan prasarana pendukung usaha pertambangan dengan pelaku usaha pertambangan/swasta.
  - c. Pemberdayaan potensi sumber daya alam yang terdapat diwilayah Kabupaten Karimun.

- d. Meningkatkan koordinasi, pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan kegiatan dengan baik dan benar.
  - e. Rehabilitasi dan konservasi bekas wilayah pertambangan yang telah diusahakan oleh pelaku/ perusahaan pertambangan.
3. Program-program pembangunan.
- a. Program pemberdayaan masyarakat disekitar lokasi pertambangan dan masyarakat diwilayah penambangan lainnya.
  - b. Program peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
  - c. Program peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam.
  - d. Program pengembangan sumber daya alam dibidang pertambangan.
  - e. Program peningkatan kesejahteraan pekerja tambang dan masyarakat disekitar lokasi penambangan.

### **1.3 Jenis Dan Jumlah Usaha Pertambangan di Kabupaten Karimun**

Adapun jenis usaha pertambangan yang terdapat dan sedang diusahakan diwilayah Kabupaten Karimun terdiri dari jenis usaha ( Hasan Alwi,2010 : 33 )

- 1. Pertambangan Timah
- 2. Pertambangan Bauksit
- 3. Pertambangan Batu Geranit
- 4. Pertambangan Pasir Darat
- 5. Pasir laut

a. Pertambangan Timah

Pernambangan timah di Kabupaten Karimun terdapat di dua wilayah kecamatan yaitu kecamatan Kundur Barat dan kecamatan karimun, proses pemanbangannya dilakukan di darat dan di laut. Proses penambangan timah darat ditunjang peralatan yang memadai seperti pompa semprot dan tambang spiral dimana pengoprasianya sesuai dengan pedoman dan prosedur penambangan yang baik. Untuk penambangan laut, perusahaan mengoprasikan kapal keruk dengan jenis Bucket Line Dredges dengan ukuran mangkuk mulai dari 7 cuft sampai dengan 24 cuft dan dapat beroperasi mulai dari 15 sampai 60 meter dibawah permukaan laut dengan kemampuan gali mencapai lebih dari 3,5 juta meter kubik material setiap bulan.

Perusahaan pertambangan timah yang hingga saat ini masih memiliki izin usaha oprasi produksi (IUP) sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :

1. PT. Eunindo Usaha Mandiri.
2. PT. Penta Inti Mandiri.
3. PT. Karimun Mining.

b. Pertambangan Bauksit

Bauksit adalah batuan yang rupanya seperti lempung kering, putih kemerahan yang mengandung 55% - 65% Al, sehingga merupakan bijih dari aluminium.

Bauksit merupakan campuran kloid al oksida Al dan Fe yang mengandung air. Kata bauksit digunakan untuk bijih yang mengandung oksida aluminium monohidrat atau trihidrat. Berupa mineral gipsit ( $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ ), ochrit ( $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ) atau diaspor ( $\text{AlO}(\text{OH})$ ). Bauksit terjadi akibat adanya pelapukan dari material yang mengandung alumina. Endapan yang besar terjadi di daerah-daerah yang beriklim tropis dan subtropis basah.

Wilayah cadangan bauksit yang terdapat di wilayah kabupaten Karimun tersebar di wilayah daratan yang terdapat di pulau-pulau seperti : Pulau Belat, Pulau Papan, Pulau Kas, Pulau Ngal, Pulau Propos dan Pulau pulau kecil lainnya yang terdapat di kecamatan Kundur dan Kundur Utara.

Perusahaan yang masih aktif dan sedang melakukan kegiatan operasi produksi hingga saat ini sebanyak 2 (dua) perusahaan yang berlokasi di wilayah kecamatan durai dan kecamatan buru. Adapun perusahaan yang sedang melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah :

1. PT. Bukit Merah Indah
2. PT. Aneka Alam Anugrah.

#### c. Pertambangan Batu Geranit

Geranit adalah jenis batuan intrusif, felsik, igneus yang umum dan banyak ditemukan, geranit kebanyakan besar keras dan kuat dan oleh karena itu banyak digunakan sebagai batuan untuk konstruksi. Kepadatan rata-rata geranit adalah  $2,75 \text{ gr/cm}^3$  dengan jangkauan antara 1,74 dan 2,80. Kata geranit berasal dari bahasa latin *granum*.

Potensi cadangan batu Geranit yang ada di wilayah Kabupaten Karimun sebagian besar terdapat di daratan pulau karimun.

Hingga saat ini hanya terdapat 3 perusahaan yang masih aktif melakukan kegiatan penambangan/ produksi yang telah di mulai sejak tahun 1990an.

#### d. Pertambangan Pasir Darat

Bentuk lahan pulau karimun sangat dipengaruhi oleh sifat fisik batuan dasarnya yang tersusun dari batuan intrusive asam dan batuan malihan serta hasil rombakanya merupakan endapan sedimen muda yang kaya dengan butiran pasir kuarsa berukuran kasar.

Wilayah lokasi perusahaan pertambangan pasir darat diwilayah Kabupaten Karimun terdapat dikecamatan moro. Potensi terbesar bahan galian pasir darat sebagian besar juga terdapat diwilayah kecamatan moro. Terdapat 2 perusahaan yang masih melakukan kegiatan penambangan pasir darat diwilayah kecamatan moro yaitu:

1. PT. Perintis Citra Moro
2. PT. Bintang Pasir Perimer

### **1.4 Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun.**

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun yang beralamatkan dijalan Jendral Sudirman-Poros terbentuk dan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut untuk melaksanakan kinerjanya secara efektif dan efisien.

Susunan organisasinya terdiri dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sebagai Penanggung jawab, Sekretaris yang mempunyai bawahan yaitu Kasubag. Perencanaan dan keuangan, Kasubag. Umum dan Kepegawaian yang dibuat untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan dalam peraturan. Oleh karena itu Kepala dinas dibantu oleh 4 bidang yang terdiri dari:

- a. Bidang Penyuluhan dan Pengawasan Pertambangan. yang dikepali oleh Kabid, Penyuluhan dan Pengawasan Pertambangan, yang mempunyai bawahan Kasi. Pengawasan Air Bawah Tanah dan Staf bidang Penyuluhan dan Pengawasan Pertambangan.
- b. Bidang Migas dan Kelistrikan dikepalai oleh Kabid Migas dan Kelistrikan. yang mempunyai bawahan staf Migas dan Kelistrikan.
- c. Bidang Pertambangan. Dikepalai oleh kabid. Pertambangan, membawahi Kasi. Konservasi dan Restorasi dan Staf bidang Pertambangan
- d. Bidang Energi. Dikepali oleh Kabid Energi, yang mempunyai bawahan yaitu Staf Bidang Energi.

### **1.5 Tingkat Pendidikan Akhir Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun.**

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun merupakan salah satu Dinas yang ada di Kabupaten Karimun yang cukup berpotensi untuk menambah penghasilan asli daerah (PAD), oleh karena itu para pemerintah Kabupaten Karimun itu sendiri sengaja merekrut pegawai yang dinilai biasa dan paham dalam mengerjakan segala tugas dengan baik, berkaitan dengan itu pendidikan merupakan

suatu hal penting untuk menunjang proses pelaksanaan dan pengerjaan segala tugas-tugas yang diberikan.

Berikut adalah tingkat pendidikan akhir pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun.

**Tabel IV. 1 : Tingkat Pendidikan Akhir Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun.**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SLTA	5	15,15%
2.	Diploma	10	30,30%
3.	S1	14	42,42%
4.	S2	4	12,12
<b>Jumlah</b>		<b>33</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun*

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwasanya dari 33 pegawai yang bekerja di Dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun terdapat 4 (empat) jenis tingkat pendidikan yang ada yaitu SLTA, Diploma, S1, S2 dan jumlah masing - masing pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut, SLTA terdapat 5 Orang Diploma terdapat 10 orang S1 terdapat 14 orang dan S2 terdapat 4 orang.

#### **4.6. Uraian Tugas (*Job Description*) Bagian/Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun.**

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menjalankan dari kinerjanya, berikut adalah tupoksi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun.

1. Tugas Sekretaris, adalah sebagai berikut:

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis administrasi umum, keuangan,Kepegawaian serta perencanaan dinas.

Uraian tugas yang dimaksud ialah:

- a. Merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan Dinas
- b. Melaksanaakan pelayanan ketatausahaan surat menyurat kepada seluruh unit.
- c. Mengelola urusan rumah tangga Dinas
- d. Mengelola keuangan Dinas
- e. Mengelola urusan kepegawaian di lingkungan Dinas
- f. Menyusun merencanakan Kegiatan Dinas
- g. Menyusun laporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas
- h. Melaksanakan tugas lain di bidang ketatausahaan yang di tugaskan oleh pimpinan.



2. Tugas Bidang Penyuluhan dan Pengawasan Pertambangan adalah sebagai berikut :

Bidang penyuluhan dan pengawasan pertambangan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan dan petunjuk teknis penataan, pembinaan dan pengembangan kegiatan penyuluhan dan pengawasan pertambangan.

Uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Melakukan perencanaan dan pelaporan dalam rangka penyuluhan dan pengawasan pertambangan.
  - b. Mempersiapkan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan pertambangan.
  - c. Melaksanakan pengujian, pemeriksaan dokumen dan perizinan kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan.
  - d. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan, pembinaan dan pengembangan penyuluhan dan pengawasan pertambangan.
  - e. Melaksanakan tugas lain dibidang penyulan dan pengawasan pertambangan yang di tugaskan oleh pimpinan.
3. Tugas Bidang Migas dan Kelistrikan adalah sebagai berikut :

Bidang Migas dan Kelistrikan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan dan petunjuk teknis penataan, pembinaan dan pengembangan kegiatan migas dan kelistrikanyang menjadi kewenangan daerah.

Uraian tuan yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan migas dan kelistrikan.
- b. Melaksanakan kegiatan Migas dan Kelistrikan.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka kegiatan Migas dan Kelistrikan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang dtugaskan oleh pimpinan.

4. Tugas Bidang Pertambangan adalah sebagai berikut :

Bidang pertambangan mempunyai tugas pokok penyusunan pelaksanaan kerjasama dan bagi hasil pertambangan serta melakukan konservasi dan restorasi pertambangan, dan petunjuk teknis pemberian perizinan dan melakukan pengendalian pertambangan yang menjadi kewenangan daerah.

Uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis mekanisme kerjasama disektor pertambangan.
- b. Melakukan kerjasama dalam upaya pengembangan potensi pertambangan daerah.
- c. Mempersiapkan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan bagi hasil pertambangan.
- d. Mempersiapkan rekomendasi dalam rangka pemberian perizinan pengelolaan pertambangan.
- e. Mempersiapkan dan melaksanakan pengaturan dan pengendalian kegiatan eksplorasi mapun kegiatan eksploitasi.

- f. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan konservasi dan restorasi.
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan, pembinaan dan pengembangan daerah.
- h. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

5. Tugas bidang Energi adalah sebagai berikut:

Bidang energi mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan dan petunjuk teknis penataan dan pengembangan tenaga energi yang menjadi kewenangan daerah.

Uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan perencanaan dan pelaporan dalam rangka pengembangan tenaga energi yang ada di daerah.
- b. Mempersiapkan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga energi.
- c. Mempersiapkan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perizinan, pengaturandan pengendalian kegiatan pengelolaan dan manfaat tenaga energi.
- d. Melaksanakan inventarisasi potensi tenaga Energi daerah
- e. Mempersiapkan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis mekanisme kerjasama disektor pemanfaatan energi.
- f. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

## **1.6 Struktur Organisasi Pada Kantor Dinas Pertambangan Kabupaten Karimun.**

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1.1. Identitas Responden**

Untuk melanjutkan pembahasan mengenai masalah perizinan pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun terlebih dahulu penulis tetapkan beberapa identitas responden dari data yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner tersebut, di bawah ini disajikan data dalam tabel distribusi yang akan dijelaskan satu persatu.

Identitas yang ditentukan untuk memberikan gambaran tentang signifikan antara data responden dengan analisis yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian yang dikaji.

##### **A. Tingkat Pendidikan**

Sepanjang sejarah perkembangan dunia yang bersifat dinamis ini, faktor pendidikan menjadi kemutlakan yang harus diperhatikan dengan seksama oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal usia. Artinya tuntutan akan pendidikan terus mengitari siklus kehidupan manusia, bahkan pendidikan senantiasa menempati posisi teratas dalam kriteria pencapaian suatu kualitas dan produktivitas yang baik.

Pendidikan merupakan segala usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia, baik jasmani maupun naluri yang berlangsung seumur hidup, baik dijalur formal maupun informal dalam mengembangkan pembangunan sumber daya manusia.

Oleh karena itu penulis menampilkan tingkat pendidikan dari 28 (dua puluh delapan) pemilik perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Karimun yang penulis jadikan responden dalam penelitian ini dan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat pendidikan responden terhadap perusahaan yang dijalankannya.

**Tabel V.1 Jumlah Resonden pada Perusahaan Pertambangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SLTA	3	10,71 %
2.	Diploma	7	25 %
3.	S1	13	46,42 %
4.	S2	5	17,85 %
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100 %</b>

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya terdapat 4 (empat) tingkat pendidikan yaitu SLTP, Diploma, S1, dan S2 dari masing- masing pendidikan dapat dijelaskan bahwasanya untuk tingkat SLTP terdapat 3 orang atau (10,71%), tingkat Diploma 7 orang atau (25%), tingkat S1 13 orang atau (46,42%) dan untuk tingkat S2 terdapat 5 orang atau (17,85%) dari 28 responden/orang.

## **B. Tingkat Umur**

Umur merupakan salah satu yang dapat menentukan kematangan seseorang. Semakin tinggi umur seseorang, maka dinilai semakin dewasa dalam menyikapi setiap fenomena karena telah banyaknya pengalaman yang mereka peroleh. Dari

karakteristik responden berdasarkan umur yang menjadi responden dapat diketahui sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.

**Tabel V.2. Jumlah Resonden pada Perusahaan Pertambangan Berdasarkan Tingkat Umur.**

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	21-30 Tahun	3	10,71%
2.	31-40 Tahun	8	28,60%
3.	41 Tahun keatas	17	60,71%
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100%</b>

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya tingkat umur responden dari 28 orang yang berusia 21-30 berjumlah 3 orang atau (10,71%), umur 31-40 berjumlah 40 orang atau (28,60%) dan untuk umur 41 tahun keatas berjumlah 17 orang atau (60,71%).

### **C. Jenis Kelamin**

Jenis kelamin dinilai perlu untuk dijadikan bahan penelitian sehubungan dengan proses pertambangan. Untuk mengetahui jenis kelamin responden, dapat diketahui sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel V.3. Jumlah Resonden pada Perusahaan Pertambangan Berdasarkan Jenis kelamin.**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	26	92,85%
2.	Perempuan	2	7,14%
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100 %</b>

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya dari 28 responden yang ada yaitu laki-laki dan perempuan dapat dijabarkan laki-laki berjumlah 26 orang atau (92,85%) dan perempuan berjumlah 2 orang atau (7,14%). Dari tabel diatas terlihat bahwasanya responden didominasi oleh laki-laki.

#### **D. Masa kerja**

Masa kerja sangat mempengaruhi pada tingkat pemahaman akan pekerjaan seseorang, semakin lama seseorang bekerja maka semakin banyak pengetahuannya pada bidang pekerjaannya.

**Tabel V.4. Jumlah Resonden pada Perusahaan Pertambangan Berdasarkan Lama Bekerja.**

No	Lama kerja	Jumlah	Persentase
1.	1-3 Tahun	8	28,57 %
2.	4-6 Tahun	13	46,43 %
3.	7-9 Tahun	5	17,86 %
4.	Diatas 10 tahun	2	7,14 %
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100%</b>

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan lama bekerja dari 28 responden 1-3 tahun berjumlah 8 orang atau (28,57%), kemudian 4-6 tahun



berjumlah 13 orang atau (46,43%), 7-9 tahun berjumlah 5 orang atau (17,86%), dan diatas 10 tahun berjumlah 2 orang atau (7,14%)

## **1.2 Perizinan Pertambangan Pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun.**

Kegiatan pertambangan yang dilakukan di Kabupaten Karimun merupakan suatu kegiatan perusahaan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum , eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolaha dan pemurnian pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Proses Pertambangan yang dilakukan di Kabupaten Karimun harus berdasarkan Undang-undang pertambangan yang sah atau berdasarkan peraturan pemerintan pusat maupun daerah yang ada, oleh karena itu dalam memulai proses pertambangan ini harus ada pemberitahuan kepada pemerintah Kabupaten Karimun yang dikatakan didalam Undang-undang merupakan proses perizinan pertambangan. Proses perizinan pertambangan yang ada harus sesuai dengan undang-undang No 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batubara, sebagai pedoman teratas dalam proses pertambangan dan khususnya dalam hal perizinan.

Maka dari itu untuk melaksanakan proses perizinan pertambangan diperlukan beberapa persyaratan yang sesuai dengan Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan PP No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan

kegiatan pertambangan mineral dan batubara, yang mempunyai persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan Lelang

- Perusahaan memenuhi dari persyaratan Administratif
- Perusahaan memenuhi dari persyaratan Teknis
- Perusahaan memenuhi dari persyaratan Finansial

b. Persyaratan Administratif

- Memenuhi persyaratan administratif dari masing-masing jenis perusahaan.
- Memenuhi persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi.

c. Persyaratan Teknis

- Melengkapi persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi
- Peta WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang dilengkapi oleh batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

d. Lingkungan

- IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- IUP Operasi Produksi adalah pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - IUP Oprasim Produksi Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. Persyaratan Finansial.
- Memenuhi persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi
  - Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
  - Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang.
  - pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

Seperti yang telah dipaparkan diatas maka dalam proses perizinan pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun maka penulis menggunakan indikator tersebut dalam penelitian ini, Adapaun hasil dari penelitian penulis tentang perizinan pertambangan pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi berdasarkan indikatornya yaitu :

#### **A. Persyaratan Lelang**

Adapun proses perizinan pertambangan mempunyai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaksana atau pengusaha pertambangan di antaranya harus mengusahakan wilayah izin usaha pertambangan, proses ini merupakan langkah awal

pengusaha pertambangan untuk memulai proses pertambangan tersebut. Adapun persyaratan awal dalam hal ini adalah harus memenuhi persyaratan lelang, dalam hal ini terdapat beberapa sub indikator yang menjadi pembahasan untuk menjalankan dari persyaratan lelang diantaranya :

- a. Memenuhi persyaratan Administratif
- b. Memenuhi persyaratan Teknis
- c. Memenuhi persyaratan Finansial

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap persyaratan administratif dalam pemenuhan dari persyaratan lelang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.5. : Jawaban responden tentang persyaratan administratif dalam pemenuhan persyaratan lelang.**

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	4	14,28%
2.	Kurang Baik	9	32,14%
3.	Tidak Baik	15	53,57%
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100 %</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasanya jawaban responden tentang persyaratan administratif dalam pemenuhan persyaratan lelang 4 responden atau (14,28%) menjawab “Baik” 9 responden atau (32,14%) menjawab “Kurang Baik” dan mayoritas responden yaitu 15 responden atau (53,57%) menjawab “Tidak Baik” sehingga dapat disimpulkan bahwasanya dalam melaksanakan persyaratan administratif untuk memenuhi persyaratan lelang adalah “Tidak Baik”.

Kemudian Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap persyaratan Teknis dalam pemenuhan dari persyaratan lelang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.6. : Jawaban responden tentang persyaratan teknis dalam pemenuhan persyaratan lelang**

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	4	14,28%
2.	Kurang Baik	11	39,28%
3.	Tidak Baik	13	46,42%
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100 %</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasanya jawaban responden tentang pelaksanaan persyaratan teknis dalam pemenuhan persyaratan lelang 4 responden atau (14,28%) menjawab “ Baik” kemudian 11 responden (39,28%) menjawab “Kurang Baik” dan mayoritas dari responden yaitu berjumlah 13 responden atau (46,42%) menjawab “Tidak Baik”. Maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam melaksanakan persyaratan teknis untuk memenuhi persyaratan lelang adalah “Tidak Baik”.

Kemudian Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap persyaratan finansial dalam pemenuhan dari persyaratan lelang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V. 7 : Jawaban responden tentang persyaratan finansial dalam pemenuhan persyaratan lelang**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
1.	Baik	3	10,71%
2.	Kurang Baik	14	50%
3.	Tidak Baik	11	39,28%
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100 %</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasanya jawaban responden tentang persyaratan finansial dalam pemenuhan persyaratan lelang 3 responden atau (10,71%) menjawab “Baik” kemudian 14 responden atau (50%) menjawab “Kurang Baik” dan mayoritas yaitu dari 11 responden atau (39,28%) menjawab “Tidak Baik”.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang pelaksanaan dari persyaratan lelang sehubungan dengan persyaratan izin usaha pertambangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel. V . 8 : Rekap jawaban responden tentang kesanggupan dalam memenuhi persyaratan lelang untuk mendapatkan wilayah usaha izin pertambangan (WIUP).**

No	Item Pertanyaan	Kategori Jawaban			Jumlah
		B	KB	TB	
1.	Memenuhi persyaratan administratif	4	9	15	28
2.	Memenuhi persyaratan teknis.	4	11	13	28
3.	Memenuhi persyaratan finansial	3	14	11	28
<b>Jumlah</b>		11	34	39	84
<b>Persentase</b>		14,28	39,28	46,42	100

*Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012*

Berdasarkan hasil rekap dari jawaban responden dalam memenuhi persyaratan lelang untuk mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang menjawab “Baik” berjumlah 11 atau (14,28%) . Kemudian yang menyatakan “Kurang Baik” berjumlah 34 atau (39,28%) . Selanjutnya yang menyatakan “Tidak Baik” berjumlah 39 atau (46,42%) . hal ini juga di dukung dengan wawancara penulis kepada ketua bidang pertambangan dan kepala seksi pertambangan. pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun, ia mengatakan bahwasanya dalam melaksanakan persyaratan perizinan pertambangan, perusahaan sangat lama dalam memenuhi persyaratan yang ada khususnya pada persyaratan administratif dan persyaratan teknis dikarenakan persyaratan tersebut mempunyai banyak ketentuan yang harus dipenuhi dan tidak memungkinkan jika dalam 14 hari kerja semua persyaratan itu dapat terpenuhi, dan dalam pelaksanaanya juga perusahaan terkadang

mengalami kesalahan didalam memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut sehingga dalam waktu 14 hari kerja tidak memungkinkan untuk perusahaan dapat memenuhi segala persyaratan yang ada kemudian pada ahirnya pegawai juga harus menunggu lama untuk mengoreksi kelengkapan persyaratan yang ada.

### **B. Persyaratan Administratif**

Persyaratan administratif yang di maksud dalam indikator diatas merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) yang harus dipenuhi oleh pemohon perizinan pertambangan / perusahaan. Dalam hal ini terdapat sub indikator sebagai pembahasan untuk memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :

- Memenuhi persyaratan administratif dari masing-masing jenis perusahaan.
- Memenuhi persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi

Adapun untuk mengetahui jawaban responden tentang pelaksanaan memenuhi persyaratan administratif dari masing-masing jenis perusahaan adalah sebagai berikut.

**Tabel V. 9 : Jawaban responden tentang pelaksanaan memenuhi persyaratan administratif dari masing-masing jenis perusahaan dalam rangka pemenuhan persyaratan administratif**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
1.	Baik	12	42,86 %
2.	Kurang Baik	11	39,28 %
3.	Tidak Baik	5	17,86 %
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100 %</b>



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasanya jawaban responden tentang pelaksanaan persyaratan administratif dalam pemenuhan persyaratan adminiatratif untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) yang menjawab “Baik” berjumlah 12 responden atau (42,86%), dan jawaban “Kurang Baik” berjumlah 11 responden atau (39,28%) kemudian yang menjawab “Tidak Baik” 5 responden atau (17,86%). Maka dari tabel diatas dapat diketahui bahwasanya yang menjadi jawaban dominan dari pelaksanaan persyaratan administratif dari masing-masing jenis perusahaan adalah jawaban “Baik”

Adapun untuk mengetahui jawaban responden tentang pelaksanaan memenuhi persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi adalah sebagai berikut.

**Tabel V. 10 : Jawaban responden tentang pelaksanaan memenuhi persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi dalam rangka pemenuhan persyaratan administratif.**

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	10	35,71 %
2.	Kurang Baik	9	32,14 %
3.	Tidak Baik	9	32,14 %
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100 %</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasanya jawaban responden tentang pelaksanaan persyaratan memenuhi persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi dalam pemenuhan persyaratan adminiatratif untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) yang menjawab “Baik” berjumlah 10 responden atau (35,71%), dan untuk jawaban “Kurang Baik” berjumlah 9 responden (32,14%) kemudian untuk

jawaban “Tidak Baik” berjumlah 9 responden atau (32,14%). Maka dari tabel diatas dapat diketahui bahwasanya yang menjadi jawaban dominan dari pelaksanaan persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi adalah jawaban “Baik”

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang pelaksanaan dari persyaratan administratif sehubungan dengan persyaratan izin usaha pertambangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel. V . 11 : Rekap jawaban responden tentang kesanggupan dalam memenuhi persyaratan administratif untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).**

No	Item Pertanyaan	Kategori Jawaban			Jumlah
		B	KB	TB	
1.	Memenuhi persyaratan administratif dari masing-masing jenis perusahaan.	12	11	5	28
2.	Memenuhi persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi	10	9	9	28
<b>Jumlah</b>		22	20	14	56
<b>Persentase</b>		39,28	35,71	25	100

**Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012**

Berdasarkan jawaban responden tentang kesanggupan dalam memenuhi persyaratan administratif untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP), yang menjawab “Baik” 22 atau (39,28%) dan untuk yang menjawab “Kurang Baik”

berjumlah 20 atau (35,71%) kemudian untuk yang menjawab “Tidak Baik” 14 atau (25%).

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya perusahaan pertambangan dalam memenuhi persyaratan administratif untuk mendapatkan izin usaha pertambangan pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun adalah dipandang “Baik”. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara penulis kepada ketua seksi pertambangan di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun, ia mengatakan bahwasanya dalam usaha untuk mendapatkan izin usaha pertambangan, untuk persyaratan administratif memang telah dipenuhi dengan baik oleh perusahaan namun masih terdapat perusahaan yang lambat dalam memenuhi dari persyaratan tersebut.

### **C. Persyaratan Teknis**

Aspek teknis merupakan suatu bagian syarat untuk pengusahaan pertambangan, dimana dari persyaratan teknis ini merupakan persyaratan yang lebih kepada keadaan yang terjadi dilapangan dan batasan koordinat di wilayah izin usaha pertambangan.berikut adalah sub indikator sebagai pembahasan untuk memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :

- Melengkapi persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi

- Peta WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang dilengkapi oleh batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

Untuk mengetahui jawaban responden tentang kesanggupan memenuhi melengkapi persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi dalam memenuhi persyaratan teknis untuk mendapatkan persyaratan izin usaha pertambangan (IUP) adalah sebagai berikut :

**Tabel V. 12 : Jawaban responden tentang kesanggupann melengkapi persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi dalam rangka pemenuhan dari persyatratan teknis.**

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	4	14,28%
2.	Kurang Baik	13	46,42%
3.	Tidak Baik	11	39,28 %
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100 %</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasanya jawaban responden tentang kesanggupann melengkapi persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi dalam rangka pemenuhan dari persyatratan teknis yang menjawab “Baik” berjumlah 4 responden atau (14,28%) dan untuk yang menjawab “Kurang Baik” berjumlah 13 responden atau (46,42%) kemudian untuk yang menjawab “Tidak Baik” berjumlah 11 responden atau (39,28%). Maka jawaban doninan tentang Jawaban responden tentang

pelaksanaan perusahaan melengkapi persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi dalam rangka pemenuhan dari persyaratan teknis adalah “Kurang Baik”.

Untuk mengetahui jawaban responden tentang kesanggupan melengkapi persyaratan Peta WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang dilengkapi oleh batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional. dalam memenuhi persyaratan teknis untuk mendapatkan persyaratan izin usaha pertambangan (IUP) adalah sebagai berikut :

**Tabel V. 13 : Jawaban responden tentang kesanggupann melengkapi persyaratan Peta WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang dilengkapi oleh batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dalam rangka memenuhi dari persyaratan teknis.**

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	6	21,42%
2.	Kurang Baik	15	53,57%
3.	Tidak Baik	7	25%
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan jawaban responden tentang kesanggupan melengkapi persyaratan Peta WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang dilengkapi oleh batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dalam rangka memenuhi dari persyaratan teknis (IUP), yang menjawab “Baik” berjumlah 6 responden atau (21,42%), dan untuk yang menjawab “Kurang Baik” berjumlah 15 responden (53,57%) kemudian untuk yang menjawab “Tidak Baik” adalah berjumlah 7 responden atau (25%). Maka dapat diketahui

bahwasanya yang dominan dalam jawaban tersebut adalah pada jawaban “Kurang Baik”.

Untuk mengetahui jawaban responden tentang pelaksanaan dalam memenuhi persyaratan teknis untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) adalah sebagai berikut :

**Tabel. V . 14 : Rekap jawaban responden tentang kesanggupan dalam memenuhi persyaratan teknis untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).**

No	Item Pertanyaan	Kategori Jawaban			Jumlah
		B	KB	TB	
1.	Melengkapi persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi.	4	13	11	28
2.	Peta WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang dilengkapi oleh batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.	6	15	7	28
<b>Jumlah</b>		10	28	18	57
<b>Persentase</b>		17,85	50	32,14	100

**Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012**

Berdasarkan jawaban responden tentang pelaksanaan dalam melengkapi persyaratan teknis untuk memenuhi persyaratan izin usaha pertambangan yang menjawab “Baik” berjumlah 10 atau (17,85%) dan untuk yang menjawab “Kurang

Baik” 28 atau ( 50%) kemudian untuk yang menjawab “Tidak Baik” 18 atau (32,14%).

Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya perusahaan dalam melengkapi persyaratan teknis untuk melengkapi persyaratan izin usaha pertambangan (IUP) berdasarkan jawaban responden adalah pada jawaban “Kurang Baik”. Dalam hal ini mengenai kelengkapan dalam memenuhi Peta WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang dilengkapi oleh batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional, maka dari itu penulis telah melakukan wawancara kepada kabid penyuluhan dan pengawasan pertambangan pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun, ia mengatakan bahwasanya perizinan dalam hal pemenuhan persyaratan teknis ini sangat disayangkan karena cadangan kekayaan alam seperti bauksit terdapat pada pulau-pulau yang luasnya mencapai 300 hektar saja namun karena luas daerah tersebut belum merupakan kriteria dari persyaratan yang ada maka hasil kekayaan alam tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, kemudian tentu saja berdampak kepada pemenuhan persyaratan yang ada yang membuat pihak pemohon tidak mendapatkan izin pertambangan.

#### **D. Lingkungan**

Aspek lingkungan merupakan bagian dari aspek pengusahaan pertambangan, hal ini karena terdapat komitmen dari setiap pengusaha tambang untuk memperhatikan lingkungan sebelum izin usaha pertambangan (IUP) diberi kepada

yang bersangkutan. Dalam hal ini terdapat sub indikator sebagai pembahasan untuk memenuhi persyaratan lingkungan sebagai berikut :

- IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- IUP Operasi Produksi adalah pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan
- IUP Operasi Produksi adalah Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui jawaban responden tentang izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, adalah sebagai berikut :

**Tabel V.15 : Jawaban responden berdasarkan pernyataan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (untuk eksplorasi ) dalam rangka memenuhi dari persyaratan lingkungan.**

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	13	46,42 %
2.	Kurang Baik	11	39,28 %
3.	Tidak Baik	4	14,28 %
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan jawaban responden tentang kesanggupan melengkapi pernyataan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (untuk eksplorasi ) dalam rangka memenuhi dari persyaratan lingkungan, yang menjawab “Baik” berjumlah 13 responden atau



(46,42%) dan yang menjawab “Kurang Baik” 11 responden atau (39,29%) kemudian untuk yang menjawab “Tidak Baik” 4 responden atau (14,28%).

Untuk mengetahui jawaban responden tentang izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi produksi meliputi pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut :

**Tabel V.16 : Jawaban responden berdasarkan pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ( untuk oprasi produksi ) dalam rangka memenuhi persyaratan lingkungan.**

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	14	50%
2.	Kurang Baik	11	39,28%
3.	Tidak Baik	3	10,71%
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan jawaban responden tentang kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ( untuk oprasi produksi ) dalam rangka memenuhi persyaratan lingkungan. yang menjawab “Baik” berjumlah 14 responden atau (50%) dan untuk yang menjawab “Kurang Baik” 11 responden, kemudian untuk yang menjawab “Tidak Baik” 3 responden atau (10,71%). Melihat dari jawaban responden tersebut

dapat diketahui yang mempunyai jawaban dominan yaitu pada jawaban “ Baik” atau (50%).

Untuk mengetahui jawaban responden tentang persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.( untuk operasi produksi ) dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.17 : Jawaban responden berdasarkan Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.( untuk operasi produksi ) dalam rangka memenuhi persyaratan lingkungan.**

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	13	46,42 %
2.	Kurang Baik	10	35,71 %
3.	Tidak Baik	5	17,85 %
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan jawaban responden tentang persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.( untuk operasi produksi ) dalam rangka memenuhi persyaratan lingkungan yang menjawab “Baik” berjumlah 13 responden atau (46,42 %) dan untuk yang menjawab “Kurang Baik” adalah 10 responden atau (35,71%) kemudian untuk yang menjawab “Tidak Baik” 5 responden atau (17,85%). Melihat dari jawaban responden tersebut maka dapat diketahui bahawasanya yang menjadi jawaban dominan adalah pada jawaban “Baik”.

Untuk mengetahui jawaban responden tentang kesanggupan dalam memenuhi persyaratan lingkungan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) adalah sebagai berikut :

**Tabel. V . 18 : Rekap jawaban responden tentang kesanggupan dalam memenuhi persyaratan lingkungan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).**

No	Item Pertanyaan	Kategori Jawaban			Jumlah
		B	KB	TB	
1.	Pernyataan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. ( untuk eksplorasi )	13	11	4	28
2.	Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (untuk oprasi produksi).	14	11	3	28
3.	Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.( untuk operasi produksi ).	13	10	5	28
<b>Jumlah</b>		40	32	12	84
<b>Persentase</b>		46,42	39,28	14,28	100

*Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012*

Berdasarkan jawaban responden tentang pelaksanaan dalam melengkapi persyaratan lingkungan untuk memenuhi persyaratan izin usaha pertambangan yang menjawab “Baik” rata-rata berjumlah 40 atau (46,42%) dan yang menjawab “Kurang Baik” berjumlah 32 atau (39,28%) kemudian untuk yang menjawab “Tidak Baik” rata-rata berjumlah 12 atau (14,28%).

Maka dapat diketahui bahwasanya perusahaan dalam memenuhi dari persyaratan lingkungan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) adalah “Baik”. Sesuai dengan wawancara penulis kepada kepala bidang perizinan pertambangan, ia mengatakan bahwasanya dalam pemenuhan persyaratan lingkungan perusahaan jarang sekali mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya sehingga persyaratan ini dapat diselesaikan dengan baik walaupun terkadang terdapat beberapa perusahaan yang lambat dalam memenuhi persyaratan ini. Didalam persyaratan lingkungan ini juga terdapat pengontrolan dari Dinas Pertambangan dan Energi yang langsung terjun kelapangan untuk melihat situasi dan kondisi tempat pelaksanaan kegiatan pertambangan sehingga pegawai dapat langsung memberikan arahan tentang keadaan lingkungan kepada pihak perusahaan.

#### **E. Persyaratan Finansial.**

Dalam rangka melaksanakan proses pertambangan mineral dan batubara finansial memang menjadi persyaratan untuk melaksanakan proses perizinan pertambangan hal ini berkaitan dengan jumlah modal ataupun hasil dari proses

pengerjaan, bukti-bukti pembayaran dan laporan-laporan keuangan perusahaan pertambangan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun.

Dalam hal ini terdapat sub indikator sebagai pembahasan untuk memenuhi persyaratan finansial sebagai berikut :

- Memenuhi persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi.
- Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public.
- Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang.
- Pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

Untuk mengetahui jawaban responden dalam memenuhi persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi dalam persyaratan finansial adalah sebagai berikut :

**Tabel V.19 : Jawaban responden berdasarkan pemenuhan persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi didalam persyaratan finansial untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).**

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	11	39,28 %
2.	Kurang Baik	9	32,14 %
3.	Tidak Baik	8	28,57 %
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan jawaban responden tentang pemenuhan persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi didalam persyaratan finansial untuk mendapatkan izin usaha

pertambangan (IUP), maka yang menjawab “Baik” berjumlah 11 responden atau (39,28%) dan yang menjawab “Kurang Baik” adalah berjumlah 9 responden atau (32,14%) kemudian responden yang menjawab “Tidak Baik” adalah 8 responden atau (28,57%).

Untuk mengetahui jawaban responden dalam memenuhi persyaratan Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam rangka pemenuhan dari persyaratan finansial untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP adalah sebagai berikut:

**Tabel V.20 : Jawaban responden berdasarkan pemenuhan persyaratan Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public dalam rangka pemenuhan dari persyaratan finansial untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).**

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	9	42,85 %
2.	Kurang Baik	12	32, 14 %
3.	Tidak Baik	7	25 %
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan jawaban responden tentang persyaratan Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam rangka melaksanakan dari persyaratan finansial untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) maka yang menjawab “Baik” berjumlah 9 responden atau (42,85%) dan untuk yang menjawab “Kurang Baik” berjumlah 12 responden atau (32,14 %) kemudian untuk yang menjawab “Tidak Baik” berjumlah 7 responden atau (25%). Dari jawaban responden

dapat disimpulkan bahwasanya yang mempunyai jawaban pada tabel diatas adalah pada jawaban “Kurang Baik”.

Untuk mengetahui jawaban responden dalam memenuhi persyaratan bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.21 : Jawaban responden berdasarkan Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang dalam rangka memenuhi persyaratan finansial untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).**

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	4	14,28 %
2.	Kurang Baik	14	50 %
3.	Tidak Baik	10	35,71 %
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan jawaban responden tentang persyaratan Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang dalam rangka memenuhi persyaratan finansial untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP), maka yang menjawab “Baik” berjumlah 4 responden atau (14,28%) dan untuk yang menjawab “Kurang Baik” berjumlah 14 responden atau (50%) kemudian untuk yang menjawab “Tidak Baik” berjumlah 10 responden atau (35,71%). Dari jawaban responden dapat disimpulkan

bahwasanya yang mempunyai jawaban pada table diatas adalah pada jawaban “Kurang Baik”.

Untuk mengetahui jawaban responden dalam memenuhi persyaratan Pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah. dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.22 : Jawaban responden berdasarkan Pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah. dalam rangka memenuhi persyaratan finansial untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).**

No	Tingkat Pelaksanaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	8	28,57 %
2.	Kurang Baik	17	60,71 %
3.	Tidak Baik	3	10,71 %
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan jawaban responden tentang persyaratan Pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah. dalam rangka memenuhi persyaratan finansial untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP, maka yang menjawab “Baik” berjumlah 8 responden atau (28,57%) dan untuk yang menjawab “Kurang Baik” berjumlah 17 responden atau (60,71%) kemudian untuk yang menjawab “Tidak Baik” berjumlah 3 responden atau (10,71%). Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwasanya yang mempunyai jawaban pada table diatas adalah pada jawaban “Kurang Baik”.



Untuk mengetahui jawaban responden tentang kesanggupan dalam memenuhi persyaratan finansial untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) adalah sebagai berikut :

**Tabel V . 23 : Rekap jawaban responden tentang kesanggupan dalam memenuhi persyaratan finansial untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).**

No	Item Pertanyaan	Kategori Jawaban			Jumlah
		B	KB	TB	
1.	Berdasarkan pemenuhan persyaratan eksplorasi dan eksplorasi produksi didalam persyaratan finansial untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).	11	9	8	28
2.	Berdasarkan pemenuhan persyaratan Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.	9	12	7	28
3.	Berdasarkan Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang.	4	14	10	28
4.	Pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.	8	17	3	28

<b>Jumlah</b>	32	52	28	112
<b>Persentase</b>	28,57	46,42	25	100

*Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012*

Berdasarkan jawaban responden tentang pelaksanaan dalam melengkapi persyaratan finansial untuk memenuhi persyaratan izin usaha pertambangan yang menjawab “Baik” rata-rata berjumlah 32 atau (28,57%) dan yang menjawab “Kurang Baik” rata-rata berjumlah 52 responden atau (46,42%) kemudian untuk yang menjawab “Tidak Baik” rata-rata berjumlah 28 atau (25%).

Dari hasil wawancara penulis kepada ketua seksi pertambangan, ia mengatakan bahwasanya persyaratan finansial menjadi dampak dari persyaratan-persyaratan lelang dan teknis yang tidak baik karena didalam pelaksanaan dari persyaratan finansial ini menyebutkan tentang bukti-bukti dan laporan tentang persyaratan lelang dan teknis, jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi dengan baik maka secara otomatis bukti-bukti keuangan dan laporan keuangan tidak dapat terpenuhi dengan baik pula.

Dari uraian masing-masing indikator variabel pada tabel diatas maka secara keseluruhan dapat dilihat rekap data masing-masing indikator variabel sebagai berikut.

**Tabel V.24 : Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Pelaksanaan Perizinan Pertambangan Pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun.**

No	Item Pertanyaan	Kategori Jawaban			Jumlah
		B	KB	TB	
1.	Persyaratan Lelang	4	11	13	28
2.	Persyaratan Administratif	11	10	7	28
3.	Persyaratan Teknis	5	14	9	28
4.	Persyaratan Lingkungan	15	9	4	28
5.	Persyaratan Finansial	8	13	7	28
<b>Jumlah</b>		43	57	40	140
<b>Persentase</b>		<b>42,85</b>	<b>57,14</b>	<b>39,28</b>	100

*Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012*

Selanjutnya untuk mengetahui hasil tabulasi dalam menilai jawaban responden pada masing-masing pertanyaan dapat dilakukan dengan cara sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Ari Kunto (2003:43) sebagai berikut ini:

$$\text{Baik} : 3 \times 43 = 129$$

$$\text{Kurang Baik} : 2 \times 57 = 114$$

$$\begin{aligned} \text{Tidak Baik} & : \frac{1 \times 40}{420} = 40 + \\ & = \frac{283}{420} \times 100 = \mathbf{67,30\%} \end{aligned}$$

Bedasarkan rekapitulasi di atas maka dapat diketahui bahwa hasil penelitian tentang Perizinan Pertambangan Pada Kantor Dinas Pertambangan Kabupaten Karimun , untuk kategori “Kurang Baik” diperoleh jawaban berjumlah 57 atau

(57,14%) indikator yang dominan menyatakan “Kurang Baik” adalah “ Persyaratan Teknis dan persyaratan Finansial”.

Kemudian berjumlah 43 atau (42,85%) yang menyatakan Perizinan pertambangan pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun dalam Kategori “Baik”, indikator yang dominan pada kategori ini adalah “Persyaratan Administratif” dan ”Persyaratan Lingkungan”.

Selanjutnya tanggapan responden pada kategori “Tidak Baik” berjumlah 40 atau (39,28%) yang mana indikator yang dominan pada “Persyaratan Lelang”.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan yang diperoleh penulis dari hasil Quisioner, Wawancara dan Data Sekunder dengan masing-masing Sub Indikator kemudian data yang bersumber dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun maka penelitian penulis tentang “ Analisis Perizinan Pertambangan pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun (Studi Implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) ” berada pada kategori jawaban “**Kurang Baik**” atau (67,30%)

Dari ahir pembahasan maka di dapat kesimpulan bahwasanya kendala-kendala didalam pelaksanaan perizinan pertambangan pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun adalah :

1. Karena terlalu panjangnya persyaratan-persyaratan dan ketentuan yang digunakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun. Sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam memenuhinya.
2. Perusahaan dalam memenuhi ketentuan dan persyaratan lebih dari waktu yang ditentukan.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 1.1. Kesimpulan

##### 1. Hasil penelitian

Bedasarkan data yang telah dikumpulkan yang diperoleh penulis dari hasil Quisioner, Wawancara dan Data Sekunder dengan masing-masing Sub Indikator kemudian data yang bersumber dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun maka penelitian penulis tentang “ Analisis Perizinan Pertambangan pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun (Studi Implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) ” berada pada kategori jawaban “**Kurang Baik**”atau (67,30%).

##### 2. Kendala-kendala

didalam pelaksanaan perizinan pertambangan pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun adalah :

- a. Karena terlalu panjangnya persyaratan-persyaratan dan ketentuan didalam Undang-undang yang digunakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun. Sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam memenuhinya.
- b. Perusahaan dalam memenuhi ketentuan dan persyaratan lebih dari waktu yang ditentukan.

## 6.2 Saran

Terdapat beberapa saran dari penulis untuk Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun yaitu sebagai berikut :

- a. Sebaiknya Dinas Pertambangan dan Energi bersama pemerintah daerah lebih mempermudah persyaratan pertambangan khususnya dalam hal perizinan.
- b. Sebaiknya Dinas Pertambangan dan Energi bersama pemerintah lebih mempermudah persyaratan lelang sebagai syarat untuk mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), yang ditetapkan didalam peraturan daerah (Perda) sesuai dengan kesepakatan antara pemohon perizinan dan pemerintah daerah.
- c. Sebaiknya didalam pelaksanaan perizinan pertambangan khususnya dalam persyaratan teknis, luas dan batas wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara, pemerintah daerah berkoordinasi kepada pemerintah pusat untuk menetapkan kreteria berdasarkan kretria yang dimiliki oleh daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Alfathia, Ayu Sri. 2001. *Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 1991 Tentang Izin Tempat Usaha Di Kota Padang*, (Skripsi), Padang: Fakultas Hukum Bung Hatta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta.
- Berge dan M.Spelt. 2002. *Pengantar Hukum Perizinan*, Jakarta: Yuridika.
- Hasan, Alwi. 2010. *Profil Kegiatan Usaha Pertambangan Di kabupaten karimun*. Tanjung Balai Karimun: Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Karimun
- Prins dan Adisapoetra, kosim. 2000. *Pengantar Ilmu hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Peradnya Paramita.
- Ridwan, 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Singarimbun. 2001. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakart.
- Sunindhia dan Widiarti, Ninik. 2003. *Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang. 2001. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryabrata, Sumadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta: Bandung.
- Ulrecht. 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ikhtiar.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara edisi 2*. Jakarta: Bumi Aksara.



Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo. Peraturan Perundangan

**Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Perda :**

Kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 (Peraturan Pemerintah 2010) Tentang Pertambangan.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2001 Tentang Pertambangan Daerah.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

**Jurnal :**

<http://www.scribd.com/doc/58547868/Hukum-Perijinan>

<http://dewaarka.wordpress.com/2010/05/25/hukum-perizinan/>